TABLOID
SinarTani

TERBIT SETIAP HARI RABU
Harga Tabloid Cetak : Rp 16.000
E-paper : Rp 72.000/Tahun (48 edisi)
www.tabloidsinartani.com

Hotline/SMS : 081317575066
e-mail : redaksi@sinartani.co.id
www.sinartani.co.id

Edisi 24 - 30 September 2025
No. 4104
Tahun LVI



8 Bulan Bakti PKH ke-189 Momentum Kebangkitan Peternak Rakyat

12 Sugeng Wahyudi, Catatan Seorang Peternak

13 BIOCHAR, Solusi Jitu Benahi Lahan Rawa



BENIH PADI, FONDASI MANDIRI PANGAN



EDITORIAL

Manajemen **Perbenihan**

"Produksi benih padi tidak bisa ujug-ujug." Ungkapan tersebut datang dari salah seorang pelaku perbenihan nasional. Benih memang bukan barang pabrik yang bisa diproduksi secara instan, ada input akan keluar outputnya.

Untuk menghasilkan benih memerlukan proses yang panjang. Dari mulai riset, uji coba di lapangan, kemudian proses sertifikasi dan pelepasan yang harus memenuhi regulasi pemerintah. Semua itu memerlukan waktu yang tak sebentar, seperti barang industri lainnya.

Apalagi dalam memproduksi benih ada faktor eksternal lainnya yang sulit ditebak yakni alam. Kondisi iklim yang semakin sulit ditebak membuat upaya memproduksi benih menjadi tidak mudah. Karena itu, perencanaan dalam penyediaan benih haruslah benar-benar matang. Misalnya, untuk kebutuhan tahun mendatang, bisa jadi perlu perencanaan paling tidak dua tahun sebelumnya.

Dengan demikian, ketika pemerintah mempunyai program bantuan benih, kalangan industri benih yang diminta menyalurkan pun siap dengan stok yang ada. Bukan 'ujug-ujug' atau mendadak, sehingga menjadi dilematis bagi kalangan industri. Satu sisi kalangan industri benih sudah menyiapkan stok untuk pasar komersial, tapi di sisi lain pemerintah meminta bantuan untuk menyediakan benih bantuan untuk petani.

Jadi penting, bagi pemerintah dan swasta untuk duduk bersama menyusun strategi perbenihan nasional. Industri benih sebagai salah satu subsistem dalam sistem agribisnis memang memagang peran penting dalam menyediakan benih. Sedangkan pemerintah sebagai regulator.

Dalam pengembangan industri benih, industri memang masih sangat membutuhkan peran pemerintah agar iklim usaha menguntungkan. Salah satunya regulasi yang tak memberatkan kalangan industri perbenihan. Namun hingga kini industri menganggap regulasi pemerintah dalam perbenihan masih dianggap rumit. Misalnya, proses pelepasan varietas baru perlu disederhanakan tanpa mengorbankan mutu.

Data Kementerian Pertanian hingga 23 Juli 2025, tercatat sebanyak 1.296 varietas tanaman pangan telah dilepas secara resmi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, padi menjadi penyumbang terbesar, terdiri dari 352 varietas padi inbrida lama ditambah 14 varietas baru yang dirilis pada periode 2024–2025, serta 102 varietas padi hibrida yang telah lebih dulu beredar.

Meski pemerintah mengklaim jumlah varietas padi yang dilepas sudah cukup banyak di lapangan. Tapi di lapangan, varietas yang petani gunakan relatif sangat sedikit. Misalnya, Ciherang, Mekongga dan Inpari. Artinya proses pergantian varietas unggul baru berjalan cukup lambat. Ini menjadi pekerjaan rumah petani. Bagaimana petani mau mengganti varietas yang sudah cukup lama tersebut dengan varietas unggul baru.

Masih banyak pekerjaan rumah pemerintah dalam perbenihan. Pastinya, dengan target pemerintah mencapaian swasembada pangan, benih adalah kunci peningkatan produksi pangan dan mandiri pangan. Karena itu, ketersediaan benih bermutu dari varietas unggul sangat strategis karena menjadi tumpuan utama dalam pencapaian keberhasilan usaha tani.

MENTAN MENYAPA



Andi Amran Sulaiman
Menteri Pertanian RI

Gubernur dan Bupati, Kami Ajak Kembalikan Kejayaan Perkebunan

Kepada para Gubernur dan Bupati/Walikota, kami ajak dan himbau untuk mengambil langkah untuk menguatkan sinergi dan kolaborasi guna mengakselerasi program hilirisasi komoditas strategis. Kita ingin kembalikan kejayaan rempah-rempah, komoditas perkebunan. Anggarannya sudah ada sekitar Rp10 triliun. Dukungan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi kunci keberhasilan hilirisasi.

Sesuai gagasan besar Presiden Prabowo Subianto, hilirisasi digalakkan untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Kementerian Pertanian (Kementan) memperoleh Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sekitar Rp10 triliun pada tahun 2025 dan dua tahun ke depan.

Anggaran ini akan digunakan untuk menyediakan benih dan bibit gratis bagi 800 ribu hektar perkebunan di seluruh Indonesia dan peremajaan tanaman. Dengan program hilirisasi ini kami proyeksikan mampu membuka lapangan kerja bagi 1,6 juta orang. Jadi program hilirisasi perkebunan bukan hanya untuk meningkatkan nilai tambah produk, tetapi juga mendorong penciptaan lapangan kerja secara masif.

Program hilirisasi meliput komoditas tebu, kelapa, kelapa sawit, kakao, kopi, karet, jambu mete, pala, dan lada. Komoditas-komoditas ini memiliki peranan vital sebagai penyumbang devisa negara, penyerap tenaga kerja, pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta mendukung ketahanan pangan.

Data menunjukkan nilai ekspor komoditas perkebunan pada tahun 2024 mencapai Rp279,4 triliun atau sebesar 92,26 persen dari total ekspor pertanian yang mencapai Rp302,8 triliun. Dengan program hilirisasi, ke depan Indonesia tidak lagi mengekspor produk mentah tetapi telah menjadi produk turunan. Dengan hilirisasi, nilai ekspor diharapkan juga dapat terdongkrak.

Contohnya kita ekspor kacang mete, kakao dengan nilai Rp 26.000 per kilogram. Di Singapura diolah menjadi cokelat harganya bisa Rp1 juta. Ini akan kita hilirisasi. Jangan biarkan komoditas pertanian keluar tanpa melalui processing.

Kami berharap program hilirisasi dapat menggerakkan industri dan menyerap tenaga kerja. Dari program hilirisasi ini, pemerintah menargetkan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,6 juta orang dan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pertanian sebesar 1,02 persen serta PDRB total sebesar 0,14 persen.

Langkah ini merupakan terobosan besar yang digagas langsung oleh Presiden. Program ini akan berjalan cepat melalui sinergi pemerintah pusat bersama Kementan, Kementerian Dalam Negeri, serta dukungan nyata dari gubernur dan bupati. Kita gandengan tangan. Bapak Ibu kepala daerah terdepan untuk mengawal ini. Kalau kita sama-sama bergerak dan fokus, Indonesia bisa superpower.

Insya Allah dalam tiga tahun kita melakukan akselerasi untuk merealisasikan target yang diberikan Bapak Presiden. Dengan demikian, masalah pangan bisa kita atasi, suasana pangan nasional semakin terjaga, bahkan kita bisa memperkuat ketahanan pangan dan mendorong ekspor perkebunan untuk mendominasi pasar internasional.

SAUNG TANI



Industri benih berharap pemerintah sederhanakan regulasi
- Sederhana, bukan berarti mudahkan?

Peringati Hari Tani, sejumlah elemen petani unjuk rasa
- Berharap pemerintah lebih perhatian ke petani

Petani tebu keluhkan masuknya tetes tebu impor
- Pendapatan petani tak lagi manis



Desain Cover: Budi Putra K.
Foto Cover: Budi Putra K.

PINDAI BARCODE!
Untuk Mengakses e-paper Sinartani.



Pemimpin Umum/Penanggung Jawab : Dr. Ir. Memed Gunawan; **Pemimpin Perusahaan :** Ir. Mulyono Machmur, MS; **Pemimpin Redaksi :** Yulianto; **Redaktur Pelaksana :** Yulianto; **Redaktur :** Gesha Yuliani, S.Pi; **Staff Redaksi :** Julian Ahmad; Nattasya; Indri Hapsari, S. Sos; Echa; Herman Rafi; **Koresponden :** Wasis (Cilacap), Soleman (Jatim), Suriady (Sulsel), Abdul Azis (Aceh), Suroyo (Banten), Gultom (Sumut), Nsd (Papua Barat); **Layoutman :** Suhendra, Budi Putra Kharisma; **Korektor/Setter**: Asrori, Hamdani; **Sekretariat Redaksi:** Hamdani; **Pengembangan Bisnis :** Dewi Ratnawati; Indri; Echa Sinaga; **Keuangan:** Katijo, SE (Manajer); Ahmad Asrori; **Sekretariat Perusahaan** : Suparjan; Jamhari; Awan; **Distribusi:** Saptyan Edi Kurniawan, S.AP; Dani; Jamhari
Penerbit: PT. Duta Karya Swasta; Komisaris Utama: DR. Ir. A. H. Rahadian, M.Si; **Komisaris:** Ir. Achmad Saubari Prasodjo
Direktur Utama: DR. Ir. Memed Gunawan; **Direktur:** Ir. Mulyono Machmur, MS
Alamat Redaksi dan Pemasaran/Iklan: Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta 12550, Telp. (021) 7812162-63, 7817544 Fax: (021) 7818205
Email: redaksi@sinartani.co.id; **Izin Terbit** No. 208/SK/Menpen/SIUPP/B.2/1986; Anggota SPS No. 58/1970/11B/2002; **Izin Cetak:** Laksus Pangkopkamtibda Jaya No. Kep. 023/PK/IC/7; **Harga:** Rp. 16.000 per edisi; **Tarif Iklan: FC** Rp. 8000/mmk, **BW** Rp. 7.000/mmk; **Pembayaran:** Bank Mandiri Cab. Ragunan No. No rekening 1270096016587; Bank Mandiri Cab. Ragunan No. 127.0096.016.413, BNI'46 Cab. Dukuh Bawah Jakarta No. 14471522, Bank Agro Kantor Pusat No. 01.00457.503.1.9 a/n Surat Kabar Sinar Tani. Bank BRI Cabang Pasar Minggu: a/n PT. Duta Karya Swasta No. 0339.01.000419.30.1; **ISSN:** 0852-8586;
Percetakan: PT. Aliansi Temprina Nyata Grafika

Pendampingan Penyuluh Pertanian, Rahasia Keberhasilan Brigade Pangan

Kunci sukses Brigade Pangan ada pada pendampingan penyuluh yang memfasilitasi manajemen, membangun jejaring, dan mendorong petani berdaya saing tinggi.



Brigade Pangan (BP) muncul sebagai salah satu inovasi strategis Kementerian Pertanian untuk mempercepat tercapainya swasembada pangan nasional. Kelembagaan ini dirancang untuk menyatukan sumber daya manusia (SDM) dan lahan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta daya saing petani. Namun, upaya membangun Brigade Pangan yang efektif tidak bisa dilakukan sendiri oleh petani; peran pendampingan penyuluh pertanian menjadi kunci keberhasilan.

Hasil pengawalan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada 2025 menunjukkan, aspek kelembagaan BP masih menghadapi tantangan signifikan. Mulai dari legalitas, manajemen internal, hingga penguatan kapasitas anggota dan konsolidasi lahan, semua memerlukan pendampingan intensif. Tanpa bimbingan, kelembagaan yang ideal pun bisa gagal mencapai tujuan.

Setiap Brigade Pangan wajib memiliki dokumen resmi seperti Berita Acara Pembentukan, SK Penetapan, dan terdaftar dalam SIMLUHTAN. Selain itu, perjanjian kerja sama (PKS) pemanfaatan lahan menjadi sangat penting agar hak dan kewajiban anggota jelas sejak awal.

Peran penyuluh di sini sangat vital, karena mereka memastikan setiap dokumen lengkap, proses administrasi berjalan tepat waktu, serta setiap anggota memahami isi dan konsekuensi perjanjian. Dengan begitu, Brigade Pangan berdiri di atas fondasi hukum yang kokoh.

Keanggotaan

Struktur organisasi yang sederhana tapi efektif menjadi kunci agar BP dapat bergerak lincah. Idealnya, terdapat ketua, sekretaris, bendahara, serta beberapa bidang teknis. Mekanisme musyawarah harus diperkuat supaya seluruh anggota merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Penyuluh pertanian berperan membimbing pengurus dalam merancang struktur, membagi peran, dan memastikan setiap anggota memahami tugasnya. Mereka juga memfasilitasi keterlibatan petani milenial, yang menjadi jaminan regenerasi dan inovasi.

Keanggotaan solid adalah inti keberhasilan. Kriteria anggota harus jelas yakni petani aktif, memiliki lahan, dan siap bekerja kolektif. Penyuluh tidak hanya memotivasi, tetapi juga membantu proses rekrutmen dan memastikan anggota memahami hak dan kewajiban mereka.

Selain itu, administrasi yang baik, pencatatan keuangan, serta aturan internal yang jelas menjadi pondasi pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Di sinilah pendampingan penyuluh sangat terasa. Mereka membantu menerapkan manajemen yang sistematis, memfasilitasi pencatatan rutin, dan membimbing pengurus agar tidak terjadi kebocoran atau kesalahan administrasi.

Selain itu, penguatan kapasitas SDM menjadi perhatian utama. Pelatihan kepemimpinan, manajemen kelompok, hingga kewirausahaan menjadi kebutuhan bagi pengurus dan anggota. Penyuluh berperan sebagai ujung tombak transfer pengetahuan, baik teknis maupun manajerial.

Konsolidasi Lahan dan Jejaring Pasar

Banyak Brigade Pangan masih menghadapi kendala lahan tersebar dan belum clean and clear. Padahal pedoman BP menetapkan minimal 200 hektare dalam satu hamparan untuk skala ekonomi yang optimal. Penyuluh bertindak sebagai mediator, memfasilitasi PKS antaranggota, sehingga lahan bisa dikonsolidasikan dan efisiensi produksi meningkat.

Di sisi lain, akses pasar menjadi ujung tombak keberhasilan. BP harus membangun kemitraan dengan koperasi, BUMDes, lembaga keuangan, hingga offtaker. Penyuluh menjadi penghubung, mempertemukan BP dengan pihak terkait, dan memastikan kemitraan berjalan saling menguntungkan.

Keberhasilan Brigade Pangan tidak hanya diukur dari luas tambah tanam atau produksi, tetapi juga dari kualitas manajemen dan penggunaan bantuan. Penyuluh memastikan monitoring berjenjang, menyusun laporan transparan, dan memberikan rekomendasi perbaikan bila diperlukan. Pendampingan ini membuat BP mampu belajar dari pengalaman, menyesuaikan strategi, dan terus berkembang.

Pilar Utama Penguatan

Pendampingan penyuluh pertanian adalah pilar utama penguatan Brigade Pangan. Peran mereka tidak sekadar memberikan bimbingan teknis budidaya, tetapi juga sebagai fasilitator kelembagaan, mediator sosial, administrator program, dan penghubung jejaring kemitraan.

Dengan legalitas yang kuat, struktur organisasi jelas, anggota solid, manajemen transparan, lahan terkonsolidasi, dan jejaring pasar yang terbuka, Brigade Pangan mampu menjadi motor penggerak swasembada pangan nasional.

Di titik inilah pendampingan penyuluh pertanian menjadi rahasia keberhasilan: tanpa mereka, potensi Brigade Pangan untuk mendorong ketahanan pangan nasional hanya akan menjadi mimpi di atas kertas.

Purnomo Anggorojati

Harga Minyak Sawit Merangkak Naik

CATATAN Begawan



Harga minyak sawit berjangka Malaysia kemungkinan akan melonjak 27% ke level tertinggi lebih dari tiga tahun sebesar 5.500 ringgit per ton pada Januari–Maret 2026, karena meningkatnya konsumsi biodiesel di produsen utama Indonesia memperketat pasokan, kata analis industri Dorab Mistry pada Selasa.

Januari hingga Maret 2026 akan sangat bullish untuk harga minyak sawit berjangka dengan potensi mencapai 5.500 ringgit jika Indonesia terus mengambil alih perkebunan dan berdiskusi tentang penerapan program biodiesel B50," ujar Mistry kepada para delegasi di sebuah konferensi industri di Cartagena, Kolombia.

Harga minyak sawit diperkirakan naik setelah periode puncak produksi berakhir pada Oktober dan bisa melampaui 5.000 ringgit pada November–Desember. Saat ini pertumbuhan produksi minyak kelapa sawit hampir datar karena pohon kelapa sawit yang menua, perluasan lahan yang minimal, dan penanaman kembali pohon tertua yang terbatas membebani produksi di produsen utama Indonesia dan Malaysia.

Berdasarkan data Bloomberg, harga minyak sawit kontrak pengiriman Desember di Bursa Malaysia Derivatives naik hingga 0,6% menjadi 4.463 ringgit per ton, sebelum diperdagangkan di 4.447 ringgit saat jeda tengah hari. Sementara itu, harga minyak kedelai kontrak Desember di Chicago naik 0,1% menjadi 51,17 sen per pound dan harga minyak sawit olahan kontrak Januari di Dalian Commodity Exchange naik 0,5% menjadi 9.352 yuan per ton.

Abdul Hameed, Direktur Penjualan di Manzoor Trading Co. mengatakan tren produksi di Malaysia akan menurun bulan ini. Dia mengatakan, pelemahan lebih lanjut untuk mata uang ringgit juga menarik minat beli karena beberapa pedagang mulai membeli untuk memenuhi permintaan bulan Oktober.

Sementara itu Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menilai harga minyak sawit mentah (CPO) masih berpotensi meningkat hingga akhir 2025 di tengah tren produksi yang stagnan. Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, memperkirakan harga CPO di pasar internasional bisa bertahan pada kisaran USD1.100–USD1.200 per metrik ton, bahkan berpeluang menembus USD1.300 per metrik ton di Rotterdam.

"Kalau kita lihat data, produksi sawit Indonesia lima tahun ini stagnan. Produksi Malaysia juga sama. Sementara permintaan dunia terus meningkat, tidak hanya untuk sawit tapi juga minyak nabati lainnya," kata Eddy.

Reuters/Bisnis.com

BENIH PADI, FONDASI MANDIRI PANGAN

Presiden Prabowo Subianto telah mengibarkan bendera tinggi swasembada pangan, khususnya beras. Bahkan targetnya bukan 4 atau 5 tahun, tapi 1-2 tahun mendatang. Berbagai strategi pun dilancarkan untuk mencapai kemandirian pangan. Namun, satu persoalan yang masih pekerjaan rumah pemerintah adalah persoalan perbenihan.



Benih menjadi faktor penting dalam peningkatan produksi pangan. Meski bentuknya kecil, tapi peran benih mencapai 50-60 persen dalam keberhasilan produksi. Artinya, faktor sarana produksi lain, seperti pupuk, air, pengendalian hama penyakit dan lain-lain tidak lebih dari separohnya.

Direktur Perbenihan Ditjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian, Ladiyani Retno Widowati pun mengakui, dalam pertanian peran benih mencapai 40-60 persen dari keberhasilan budidaya. Karena itu, jika mengabaikan kualitasnya, maka bisa kehilangan kesempatan dari target produksi sebanyak 40-60 persen.

Apalagi untuk mendapatkan benih unggul, menurut Ladiyani, melalui proses yang panjang. Dari mulai proses tahapan seleksi, pengujian, pelepasan oleh pemerintah, proses produksi, sertifikasi, kemudian baru masuk peredaran. Semua itu sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan.

"Jadi kalau ada varietas muncul tiba-tiba, menjadi sesuatu yang menjadi tanda tanya. Apakah sudah sesuai rangkaian prosesnya," ujarnya. Karena itu, pemerintah telah membuat peraturan perbenihan. Dari mulai UU, kemudian peraturan pemerintah dan peraturan menteri pertanian.

Manajemen Perbenihan

Meski pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan, namun kalangan industri perbenihan berharap pemerintah lebih memperhatikan persoalan perbenihan. Direktur Utama PT. Primasid, Ayub Darmanto mengajak pemerintah bersama asosiasi perbenihan untuk menyusun strategi matang terkait ketersediaan benih.

Ia berharap kolaborasi ke depan dapat semakin erat, khususnya dalam perencanaan produksi benih padi. Pasalnya, penyediaan benih tidak bisa dilakukan secara instan. Diperlukan perencanaan jangka panjang, baik tiga, lima hingga sepuluh tahun ke depan. "Selama ini pihak swasta menyiapkan sesuai permintaan pasar. Kalau tiba-tiba pemerintah minta dalam jumlah besar, tentu kami akan kewalahan," jelasnya.

Namun dirinya mengapresiasi dukungan pemerintah terkait ketersediaan benih induk. Tapi di lapangan praktiknya, produsen benih masih harus mandiri, mulai dari mencari lahan, melatih petani, memproduksi, memproses hingga memasarkan.

Karena itu, ia berharap pemerintah turut membantu, terutama saat ingin mengembangkan padi hibrida di daerah baru yang membutuhkan biaya besar dan waktu minimal tiga tahun. "Kalau ada dukungan pemerintah, padi hibrida bisa berkembang lebih cepat dan merata ke seluruh Indonesia. Dengan begitu, kita bisa berkontribusi lebih besar pada swasembada pangan," tegasnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya dukungan perbankan. Selama ini, kredit untuk sektor perbenihan masih diperlakukan sama dengan kredit komersial, padahal risikonya lebih tinggi dan jangka waktunya panjang. "Kalau ada kebijakan khusus kredit perbenihan dengan bunga rendah, insyaallah bisa memajukan industri benih di Indonesia," tambahnya.

Direktur Utama PT Sang Hyang Seri (SHS), Adhi Cahyono Nugroho juga menekankan pentingnya perencanaan rantai pasok benih secara matang. Pasalnya, benih bukan barang instan, melainkan produk hidup yang membutuhkan waktu proses sejak penanaman hingga siap digunakan. "Perencanaan kebutuhan benih tahun depan harus disusun sejak tahun ini. Karena itu, tata kelola perbenihan dari hulu hingga hilir perlu dibenahi bersama," katanya.

Adhi juga menyoroti minimnya adopsi varietas unggul baru di kalangan petani. Dari sekitar 200 varietas yang sudah dilepas pemerintah, hanya lima varietas lama yang paling banyak digunakan. Varietas Ciherang, misalnya, sudah berusia 25 tahun, padahal secara genetik produktivitasnya terus menurun.

"Meski ada varietas baru yang bisa menghasilkan 9 ton/ha, tapi petani masih banyak menggunakan varietas lama. Akibatnya, produktivitas nasional stagnan di kisaran 5,1 ton/ha," jelasnya.

Sementara itu, Sekjen Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan Indonesia (MPPI), Adhie Widihartho menegaskan, keberhasilan sektor pangan nasional tidak bisa dilepaskan dari manajemen perbenihan yang baik. "Benih bukan hanya soal perbanyakan tanaman. "Benih adalah fondasi utama dari budidaya tanaman," ujarnya.

Adhie menilai, benih yang berkualitas menjadi penentu produktivitas. Jika benihnya bagus, pupuknya, lahan dan teknologi ditata dengan baik, maka produktivitas lahan akan meningkat. Indonesia mungkin tidak ketinggalan di sisi lahan, tapi produksi, teknologi, dan benih menjadi faktor penting untuk kedaulatan pangan.

"Kalau ingin swasembada, pemerintah harus memperhatikan bagaimana benih diproduksi, bagaimana benih disediakan, dan bagaimana benih mempunyai harga yang pantas untuk masyarakat perbenihannya," ujarnya saat Festival Benih Padi Berkualitas, Hasil Panen Melimpah di lahan PT. Sang Hyang Seri (SHS), Rabu (17/9). **Tim Sinta**



Revitalisasi Perusahaan **Plat Merah Benih**



Setiap panen berawal dari benih. Menyadari peran krusial itu, PT Sang Hyang Seri (SHS) kini menyiapkan langkah besar yaitu sebagai pusat benih nasional. Targetnya jelas, mendukung petani dan mendorong Indonesia menuju swasembada pangan.

Direktur Utama PT Sang Hyang Seri (SHS), Adhi Cahyono Nugroho, menegaskan komitmennya untuk menjadikan perusahaan pelat merah ini sebagai pusat benih nasional. "Tahun 2024, kita mulai berkomitmen harus refocusing hanya diperbenihan. Sudah saatmya kita jadikan SHS pusat perbenihan nasional, sebagai penyangga dan penyuplai benih nasional," katanya saat Festival Benih Padi Berkualitas, Hasil Panen Melimpah di lahan PT. SHS, Sukamandi, Rabu (17/9).

Langkah tersebut diyakini menjadi pondasi penting dalam upaya mewujudkan swasembada pangan di Indonesia. Menurut Adhi, keberhasilan budidaya pertanian tidak bisa dilepaskan dari kualitas benih yang digunakan. Hampir 50 persen keberhasilan panen ditentukan oleh benih. "Benih itu pondasi utama. Kalau benihnya bagus, produktivitas pasti meningkat. Jadi, peran benih sangat vital untuk mendukung swasembada pangan," ujarnya

SHS saat ini memiliki lahan seluas 3.200 hektar (ha) yang sepenuhnya difokuskan untuk produksi benih. Lahan strategis itu akan dijadikan pusat penghasil benih sumber (*stock seed*) yang nantinya bisa dimanfaatkan produsen benih swasta dalam memperbanyak benih hingga level sebar (*extension seed*). "Kami ingin mengembalikan posisi SHS sebagai pusat benih nasional, sebagaimana peran yang pernah dijalankan pada masa lalu," jelasnya.

Untuk itu, PT SHS melakukan revitalisasi lahan dan pabrik-pabrik lama agar mampu beroperasi maksimal. Dengan keberadaan 42 UPB yang tersebar di seluruh Indonesia, kapasitas terpasang seluruh pabrik mencapai 150 ribu ton per tahun.

Dari luas sawah di Sukamandi 3.200 ha, sekitar 2.700 ha digarap petani mitra dan 450 ha swakelola atau dikelola sendiri PT SHS sendiri. "Jadi sekarang ini lahan di Sukamandi itu sedang kita revitalisasi, termasuk juga alat dan fasilitas produksi pabrik benih kita," katanya.

Untuk memperkuat kapasitas produksi, kata Adhi, pihaknya menjalin kerja sama dengan petani penangkar di berbagai daerah. SHS pun meluncurkan program khusus bagi petani penangkar benih yakni program *one day payment*. Program ini memungkinkan petani menerima pembayaran hasil panen benih hanya satu hari setelah transaksi. "Kita sebagai *offtaker* dari hasil panen petani, melakukan pembayaran langsung di hari itu atau maksimal besok harinya," katanya.

Bahkan, ungkap Adhi, pihaknya akan membeli gabah dengan patokan harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 6.500/kg ditambah insentif Rp 300 per kg calon benih. Bila harga gabah di pasaran mencapai Rp 7.000, PT SHS akan membeli sesuai harga pasaran tersebut.

"Kita juga ada loyalty program. Kalau petani pada musim berikutnya masih menjadi mitra penangkar, maka kita akan tambahkan harga beli Rp 200, sehingga bisa meningkat menjadi Rp 500/kg," tuturnya. Karena itu, Adhi mengajak dan membuka peluang bagi petani untuk menjadi mitra penangkar benih PT. SHS.

"Bisa dibayangkan, dengan kebutuhan benih nasional berkisar 300–350 ribu ton dan kapasitas terpasang mencapai 150 ribu ton, SHS bisa menopang 40-50 persen kebutuhan benih nasional. Posisi ini sangat strategis untuk menjaga ketersediaan benih," ungkapnya.

Perencanaan Perbenihan

Lebih jauh, ia menekankan pentingnya perencanaan rantai pasok benih secara matang. Pasalnya, benih bukan barang instan, melainkan produk hidup yang membutuhkan waktu proses sejak penanaman hingga siap digunakan. "Perencanaan kebutuhan benih tahun depan harus disusun sejak tahun ini. Karena itu, tata kelola perbenihan dari hulu hingga hilir perlu dibenahi bersama," katanya.

Adhi juga menilai, harga benih di pasar saat ini masih belum mencerminkan nilai strategisnya. Misalnya, di katalog, harga benih hanya Rp13.400/kg, sementara harga beras premium Rp14.900/kg. Padahal benih itu pondasi utama. "Idealnya, harganya bisa lebih tinggi karena di dalamnya ada unsur riset dan inovasi, bukan sekadar perbanyakan," ungkapnya.

Adhi juga menyoroti minimnya adopsi varietas unggul baru di kalangan petani. Dari sekitar 200 varietas yang sudah dilepas pemerintah, hanya lima varietas lama yang paling banyak digunakan. Varietas Ciherang, misalnya, sudah berusia 25 tahun, padahal secara genetik produktivitasnya terus menurun.

"Meski ada varietas baru yang bisa menghasilkan 9 ton/ha, tapi petani masih banyak menggunakan varietas lama. Akibatnya, produktivitas nasional stagnan di kisaran 5,1 ton/ha," jelasnya.

Padahal lanjut Adhi, jika petani beralih ke varietas unggul baru bersertifikat, maka peningkatan produktivitas padi minimal 10 persen bisa segera dirasakan. "Itu akan langsung mendorong swasembada pangan. Biayanya pun relatif kecil, karena benih hanya menyumbang sekitar 5 persen dari total ongkos budidaya. Jadi kalau ingin memperbaiki pertanian, yang pertama harus dibenahi adalah benih," tuturnya.

Karena itu Ia mendesak pemerintah mempercepat sosialisasi penggunaan benih unggul bersertifikat kepada petani. Misalnya, varietas Ciherang hingga kini masih banyak dipakai, padahal sudah lebih dari dua dekade. "Kalau kita bisa menggeser ke varietas baru, hasil panen akan melimpah, daya saing nasional meningkat, dan nilai tukar petani ikut terangkat," ujarnya.

Menurut Adhi, benih unggul bersertifikat bukan hanya menjamin keaslian varietas, tetapi juga memberikan potensi hasil panen lebih tinggi. Jika standar pelepasan benih di Kementerian Pertanian harus mempunyai produktivitas 9 ton/ha, maka ada perbedaan signifikan dibandingkan rata-rata produktivitas nasional saat ini.

"Komitmen SHS jelas. Kualitas adalah yang utama. Benih unggul adalah kunci. Dengan benih bersertifikat, produktivitas nasional bisa meningkat, daya saing kita lebih kuat, dan petani pun lebih sejahtera. Karena itu, mari kita satu suara, kompak, dan bergerak bersama membangun ekosistem perbenihan yang sehat untuk Indonesia," tegasnya. **Herman/Yul**



Kunci Swasembada Pangan,

Perhatikan Benih!

Kualitas dan ketersediaan benih menjadi fondasi utama agar Indonesia bisa mandiri pangan dan mencapai swasembada secara berkelanjutan. Karena itu, pemerintah 'wajib' memperhatikan ketersediaan dan kualitas benih padi. Tak kalah pentingnya adalah penguatan BUMN Perbenihan sebagai penyedia sumber benih.

Indonesia berada di persimpangan jalan dalam upaya mencapai swasembada pangan, khususnya beras. Di balik target tersebut, satu hal yang kerap luput dari perhatian adalah benih. Sekjen Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan Indonesia (MPPI), Adhie Widihartho menegaskan, kualitas dan ketersediaan benih menjadi fondasi utama agar negara bisa mandiri dalam produksi pangan.

"Kalau pemerintah ingin swasembada, pemerintah harus memperhatikan bagaimana benih diproduksi, bagaimana benih disediakan, dan bagaimana benih mempunyai harga yang pantas untuk masyarakat perbenihannya," ujarnya saat Festival Benih Padi Berkualitas, Hasil Panen Melimpah di lahan PT. Sang Hyang Seri (SHS), Rabu (17/9).

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan sektor pangan nasional tidak bisa dilepaskan dari manajemen perbenihan yang baik. Sebab, menurut Adhie, benih bukan hanya soal perbanyakan tanaman. "Benih adalah fondasi utama dari budidaya tanaman," ujarnya.

Sebab Adhie menilai, benih yang berkualitas menjadi penentu produktivitas. Jika benihnya bagus, pupuknya, lahan dan teknologi ditata dengan baik, maka produktivitas lahan akan meningkat. "Indonesia mungkin tidak ketinggalan di sisi lahan, tapi produksi, teknologi, dan benih menjadi faktor penting untuk kedaulatan pangan," katanya.

Isu Perbenihan

Salah satu yang banyak dibicarakan pelaku usaha perbenihan adalah regulasi perbenihan yang dianggap masih rumit. Meskipun ada potensi besar dari produsen nasional, Adhie melihat masih banyak pekerjaan rumah terkait regulasi perbenihan. "Peraturan perundangan yang mengatur perbenihan Indonesia masih sulit. Termasuk introduksi benih baru untuk perkembangan benih nasional," katanya.

Menurutnya, proses pelepasan varietas baru perlu disederhanakan tanpa mengorbankan mutu. Proses uji adaptasi dan pengendalian penyakit, harus dilakukan secara kredibel. "Kalau regulasi terlalu berbelit, produsen kesulitan, dan masyarakat pun tidak mendapatkan benih berkualitas," ujarnya.

Selain itu, pengembangan benih untuk kualitas tertentu juga dinilai lambat dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Adhie mencontohkan, produksi benih fortifikasi yang kaya zat besi atau zinc masih rendah. "Kita baru ngomong-ngomong fortifikasi, tetapi produksi benih fortifikasi masih rendah. Jadi penting untuk segera meningkatkan ini," jelasnya.

Begitu juga harga benih yang menjadi isu sensitif. Menurut Adhie, harga benih seharusnya bisa tiga hingga empat kali lipat dari harga gabah biasa, karena melibatkan banyak biaya, mulai dari riset, pengelolaan lahan, sampai packing. Kini, harga benih dalam e-katalog pemerintah berada di angka Rp13.400/kg, sedangkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras premium mencapai Rp 14.900.

"Ini menunjukkan harga perbenihan masih di bawah harga beras. Idealnya, benih harus lebih tinggi karena nilai tambahnya jauh lebih kompleks. Kalau harga benih disamakan dengan harga gabah, tidak cukup untuk menutup biaya riset dan produksi," tutur Adhie.

Selain harga yang wajar, Adhie mengusulkan pemberian insentif kepada masyarakat perbenihan, baik penangkar maupun produsen. Insentif bisa berupa pengurangan pajak operasional, dukungan harga, atau bantuan saprodi (sarana produksi). "Yang penting ada insentif untuk mendorong produsen benih menyediakan benih berkualitas," katanya.

Isu lain soal kebutuhan benih di Indonesia yang sangat beragam, terutama karena variasi iklim dari Sabang hingga Merauke. Adhie menekankan, perlunya pemerintah menetapkan disparitas harga benih sesuai zona iklim, sehingga benih bisa beradaptasi dengan optimal di tiap wilayah. Dengan pendekatan ini, penyediaan benih nasional akan lebih efisien dan beragam, mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Adhie menyoroti peran perusahaan swasta dan BUMN perbenihan seperti PT. SHS dalam memperkuat ketahanan perbenihan nasional. Berbeda dengan lembaga penelitian pemerintah yang sering menunggu anggaran, perusahaan seperti PT SHS mampu berjalan tanpa menunggu dana pemerintah. Jadi, kerja sama pemerintah dengan produsen benih dapat mempercepat penyediaan benih berkualitas.

"Kalau pemerintah tidak punya anggaran, tidak ada jaminan kepada penangkar dan produsen benih untuk mendapatkan kualitas sumber benih yang bagus. Jadi ada kekosongan penyediaan benih nasional," katanya.

Penguatan BUMN Benih

Penguatan peran produsen benih nasional seperti PT SHS menjadi kunci menghasilkan benih berkualitas. Dengan lahan luas, fasilitas lengkap, dan SDM berpengalaman, BUMN perbenihan itu dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam penelitian benih dan memproduksi benih bina. "MPPI sangat mendukung jika SHS menjadi pusat perbenihan nasional," katanya.

Dengan lahan seluas 3.000 ha dengan Unit Pengelola Benih (UPB) 42 dan total kapasitas produksi benih diperkirakan mencapai 150 ribu ton per tahun, PT SHS mempunyai potensi sangat besar. Artinya, kehadiran SHS dalam sistem perbenihan nasional sangat strategis untuk memastikan ketersediaan benih berkualitas bagi seluruh petani di Indonesia.

Dengan strategi yang tepat, Indonesia tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan pangan nasional, tetapi juga memperkuat posisi dalam perdagangan benih di ASEAN dan dunia. Menurut Adhie, fokus pada benih berkualitas adalah investasi jangka panjang yang tidak boleh ditunda. "Benih yang berkualitas akan meningkatkan produktivitas dan menghasilkan panen berlimpah. Ini menjadi tagline seluruh masyarakat perbenihan di Indonesia," ujarnya.

Secara keseluruhan, pernyataan Adhie menegaskan swasembada pangan Indonesia tidak bisa dicapai tanpa memperkuat sektor perbenihan. Hal ini mencakup penyediaan benih berkualitas, perbaikan regulasi, insentif untuk produsen, dan sinergi antara pemerintah dan sektor swasta.

"Benih berkualitas adalah fondasi. Mulai dari benih, pupuk, lahan, hingga teknologi harus ditata dengan baik. Jika semua elemen ini berjalan, kita akan menuju kemandirian, kedaulatan, dan swasembada pangan," katanya. **Gsh/Yul**

Suara Hati

Produsen Benih Padi



Kalangan pelaku usaha perbenihan padi berharap pemerintah mengevaluasi sistem perbenihan nasional. Dari mulai regulasinya, penyediaan benih sebar hingga program bantuan benih yang ketersediaannya dari industri swasta. Suara hati produsen benih disampaikan Sekjen Asosiasi Perbenihan Indonesia (Asbenindo), Nana Laksana Ranu.

Peran benih dalam dunia pertanian sangatlah esensial. Karena itu, ketersediaan benih menjadi penting untuk mendukung upaya pemerintah mencapai swasembada pangan. Namun di sisi lain, kalangan industri masih sulit mendapatkan benih sumber dari lembaga penelitian pemerintah yang kemudian akan diperbanyak menjadi benih sebar.

Nana mengaku beberapa tahun lalu dirinya pernah sepakat dengan Balai Penelitian Padi Kementerian Pertanian untuk bisa mendapatkan benih sumber, bahkan dijanjikan beberapa varietas. Namun ketika akan menindaklanjuti kesepakatan tersebut, ternyata benih sumbernya tidak ada.

"Karena produsen benih dijanjikan beberpa varietas, waktu itu saya sempat tanyakan, apakah ada benih sumbernya? Ternyata jawabannya tidak ada, karena sudah disebarkan ke UPT Balai Penelitian di daerah," tuturnya.

Keterbatasan produksi sumber benih tersebut, menurut Nana, karena keterbatasan anggaran untuk lembaga penelitian tersebut. Padahal untuk mendapatkan benih sumber, produsen benih mengadopsi varietas padi dari lembaga penelitian padi pemerintah yang saat ini bernama BRMP Padi. "Karena terkait APBN, produksinya menjadi terbatas," ujarnya.

Karena itu, dirinya menyarankan ke depan, pemerintah bisa menyerahkan kewenangan memproduksi benih sumber kepada BUMN Benih seperti PT Sang Hyang Seri (SHS) yang sudah mempunyai kompetensi dan kemampuan. Nantinya perusahaan plat merah tersebut bisa bekerjasama dengan swasta dalam menyediakan benih sumber.

"Saya setuju ke depan PT SHS hanya memproduksi benih sumber, sehingga ketika swasta memerlukan benih sumber tidak lagi kesulitan. Jadi pemerintah perlu memberikan kewenangan kepada SHS untuk memproduksi benih sumber," ujarnya saat Festival Benih Padi Berkualitas, Hasil Panen Melimpah di lahan PT. SHS, Sukamandi, Rabu (17/9).

Hal lain yang menjadi sorotan Asbenindo adalah regulasi perbenihan nasional. Saat pemerintah menerbitkan UU Cipta Kerja, sebenarnya kalangan industri benih sudah berharap ada perbaikan regulasi dan kemudahan investasi. "Tapi kenyataannya tidak. Kita ingin bagaimana regulasi itu disederhanakan, ingat bukan dimudahkan," tegasnya.

Ia mencontohkan, ada beberapa tahapan dalam pelepasan benih yang seharusnya tidak perlu sebaiknya dihilangkan, seperti masalah administrasi. Sebab, untuk pelepasan benih baru menurut Nana, memerlukan biaya cukup besar untuk biaya uji adaptasi, kemudian biaya pembuatan propsoal untuk sidang.

"Kami kalangan industri dalam memproduksi benih yang pasti tidak akan mengorbankan mutu benih. Karena usaha perbenihan adalah investasi jangka panjang, sehingga produsen benih pasti taat terhadap peraturan," tuturnya.

Sebab lanjut Nana, produsen swasta tidak memproduksi benih dalam jumlah kecil tapi volume sangat besar, bahkan ada yang sampai 15 ribu ton. Untuk itu, perlu dana besar, teknologi dan perencanaan. Karena itu yang dibutuhkan produsen benih swasta adalah aturan yang menguntungkan semua pihak, termasuk petani dan pelaku usaha.

Hal lain yang menarik perhatian Nana adalah ketika Menteri Keuangan menarik dana di Bank Indonesia dan menyalurkan dana sebanyak Rp 200 triliun ke perbankan pemerintah. Bagi Nana, hal ini peluang bagi produsen benih untuk menyerap dana pemerintah tersebut. Apalagi dana tersebut adalah pinjaman non komersial.

Bantuan Benih

Mengenai benih bantuan, Nana mengatakan, meski jumlahnya kecil, hanya 10 persen dari total luas pertanaman padi, dibandingkan benih yang dijual di pasar bebas, tapi juga berpengaruh terhadap stok industri benih swasta. Apalagi kadang permintaan benih bantuan oleh pemerintah datangnya mendadak, sehingga industri benih yang sudah mempunyai perencanaan untuk pasar benih komersial menjadi kesulitan.

"Sekarang karena alasan refocusing, permintaan bantuan benih pemerintah datangnya ujug-ujug. Kalau seperti ini kasihan industri benih, mereka harus mengubah perencanaan pasar," ujarnya. Padahal lanjut Nana, saat memproduksi benih, produsen sudah menyiapkan alokasi pasar untuk program pemerintah dan pasar bebas.

Untuk pasar bebas, produsen biasanya selalu mengevaluasi pasarnya, sedangkan program pemerintah mereka tidak bisa mengevaluasi. Apalagi permintaan datangnya mendadak. Karena itu, Nana mengusulkan, agar APBN bantuan benih sifatnya multi year, sehingga produsen benih pun bisa mengantisipasi permintaan untuk benih bantuan.

Soal harga benih bantuan Nana juga berharap pemerintah menaikkan. Saat ini harga benih bantuan dalam e-katalog pemerintah hanya Rp13.400/kg. Sedangkan harga benih padi di pasar bebas mencapai Rp 18-20 ribu/kg. Karena itu, Nana berharap, pemerintah mau menaikan harga benih, sehingga memicu produsen untuk memproduksi benih yang lebih berkualitas.

Sementara itu kepada petani, Nana juga berpesan agar menggunakan benih berkualitas. Salah satunya saat membeli benih memperhatikan diskripsi benih. "Kalau bahasa sederhananya, bagaimana petani menggunakan benih yang punya KTP. Benih yang yang berkualitas itu yang memiliki KTP atau deskripsi," katanya.

Benih berkualitas menurut Nana, adalah varietas benih yang sudah pemerintah lepas. Salah satu syarat benih padi bisa dilepas adalah mempunyai potensi hasil hingga 9 ton/ha, jauh di atas rata-rata produktivitas padi nasional yang hanya 5 ton/ha. Artinya, ada selisih yang cukup besar.

"Jadi saya ingatkan supaya petani menerapkan budiaya padi yang benar, pupuk yang benar dan benih yang bermutu, sehingga bisa tecapai potensi hasilnya. Kalau produktivitas naik 1-2 ton/ha saja, cukup lumayan menambah produksi padi nasional," tuturnya seraya mengingatkan agar petani menggunakan benih padi berlabel biru.

Hal lain yang Nana ingatkan kepada petani adalah jangan membeli benih padi sembarangan, apalagi melalui marketplace. Sebab dikhawatirkan benih padi yang dijual tersebut tidak jelas asal usulnya. "Kalau pas tanam hasilnya bagus, alhamdulillah. Tapi kalau jelek tidak ada tempat mengadu," katanya.

Apa yang diungkapkan Nana menjadi penyambung suara industri benih nasional kepada pemerintah. **Yul**

Bulan Bakti PKH ke-189

Momentum Kebangkitan Peternak Rakyat





Kementerian Pertanian bersama Pemerintah Kabupaten Bogor sukses menggelar puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan ke-189, yang dipusatkan di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu (21/9). Mengusung tema "Ternak Sehat, Peternak Sejahtera, Indonesia Maju," acara ini menjadi lebih dari sekadar seremoni.

Bagi dunia peternakan dalam negeri kegiatan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan (PKH) menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan subsektor peternakan dan kesehatan hewan. Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan dunia peternakan dan kesehatan hewan Indonesia.

Melihat sejarahnya, Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan berawal dari larangan pemotongan sapi betina produktif (26 Agustus 1836). Selanjutnya tanggal tersebut ditetapkan sebagai Hari Peternakan. Namun sejak Tahun 2023 berganti menjadi Hari Peternakan dan Kesehatan Hewan Nasional. Artinya tahun ini kegiatan memasuki tahun ke 189.

Bulan Bakti PKH juga momen strategis yang menegaskan pentingnya subsektor peternakan dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat. Saat memberikan sambutan, Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, menegaskan bahwa subsektor peternakan kini menjadi fokus penting pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama melalui program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Ini bukan cuma soal ternak, ini soal masa depan anak-anak kita. Kita bicara gizi, budaya, ekonomi rakyat. Semua itu bisa dimulai dari ternak yang sehat," ujar Sudaryono. Apalagi lanjutnya, saat ini pertumbuhan populasi manusia lebih cepat dibanding populasi ternak seperti sapi.

Karena itu, Sudaryono mengatakan, pemerintah terus menggenjot program MBG. Apalagi program ini bukan hanya soal pemenuhan gizi. Di balik itu, tersimpan potensi besar untuk membuka pasar bagi produk peternakan lokal.

Ke depan menurutnya, kebutuhan telur, susu, dan daging akan sangat besar. Dengan demikian, akan menjadi peluang emas bagi peternak untuk tumbuh. "Kita harus pastikan peternak tidak hanya bertahan, tapi berkembang," tegasnya.

Bulan Bakti PKH ini, Sudaryono yang juga Ketua Umum HKTI ini menilai menjadi momentum sangat baik untuk bersama-sama menyukseskan Program MBG, memberantas stunting, dan mencapai swasembada pangan. "Titik beratnya bukan hanya karbohidrat, tetapi protein. Karena itu sekaranglah saatnya mengembangkan sektor peternakan," ujarnya.

Pemerintah tengah menyiapkan strategi, termasuk peningkatan populasi sapi perah dan sapi potong, demi memenuhi kebutuhan protein hewani nasional. Salah satunya melalui usulan penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Program Percepatan Produksi Susu dan Daging Nasional (P2SDN) yang telah disepakati dalam rapat bersama berbagai Kementerian dan Lembaga.

Bulan Bakti PKH ke-189 ini juga menjadi penanda bahwa subsektor peternakan Indonesia punya masa depan yang besar asal didukung kolaborasi kuat lintas sektor, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, peternak, hingga masyarakat. Dengan sinergi ini, peternakan bisa menjadi penopang utama ketahanan pangan, sumber protein bergizi, dan penggerak ekonomi lokal yang tahan krisis. "Negara harus bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada rakyatnya. Saya mengajak semua pihak untuk bergerak bersama memajukan sektor pertanian dan peternakan," ujarnya.

Bukan Sekadar Tradisi

Melalui Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan ini, Kementerian Pertanian berharap semangat para peternak semakin tumbuh, layanan kesehatan hewan makin dekat dengan masyarakat, serta produk peternakan dalam negeri semakin membanggakan.

Sementara itu Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda juga menegaskan, peringatan ini sebagai momentum penting, bukan hanya tradisi. Melainkan momentum untuk menegaskan pentingnya subsektor peternakan dan kesehatan hewan dalam menopang ketahanan pangan nasional. "Ini panggilan bagi semua elemen bangsa. Ternak yang sehat adalah dasar pangan bergizi. Peternak yang sejahtera adalah motor penggerak ekonomi rakyat," ujarnya.

Tahun ini, Kabupaten Bogor dipercaya menjadi tuan rumah puncak peringatan nasional ini. Alasan pemilihannya tak main-main, Bogor dinilai memiliki potensi besar di sektor peternakan, serta dukungan kuat dari pemerintah daerah.

Bupati Bogor Rudi Susmanto menyampaikan dukungan penuhnya terhadap kegiatan ini. Dikenal memiliki hobi beternak, Rudi menilai peternakan bukan hanya penggerak ekonomi, tetapi juga sarana memperkuat kedaulatan pangan bangsa. Ia berharap bahwa dengan adanya kolaborasi lintas sektor bisa menjadi tonggak awal pembangunan peternakan modern.

Kegiatan yang berlangsung sebulan dan dimulai sejak 26 Agustus, Bulan Bakti PKH telah diisi dengan berbagai kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat dan peternak. Diantaranya pelayanan kesehatan hewan gratis seperi vaksinasi, pengobatan ternak, dan konsultasi.

Pasar tani murah yang menyediakan produk peternakan dan pertanian dengan harga terjangkau. Kampanye konsumsi protein hewani mulai dari makan ayam, telur, dan susu bersama masyarakat. Seminar dan edukasi untuk peternak, pelaku usaha, serta tenaga teknis. Sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan dari pelayanan kesehatan hewan, vaksinasi dan pengobatan gratis, seminar, webinar, pasar tani murah, gerakan makan ayam, telur, dan susu.

Puncak acara dimeriahkan dengan senam jantung sehat, kontes kambing dan domba yang diikuti 200 peternak, lomba 112 sapi, kampanye makan daging ayam, telur, susu dan ikan, seni ketangkasan domba Garut, serta partisipasi 39 perusahaan dan 62 UMKM dari Kabupaten Bogor.

Pada kesempatan itu, diberikan pula penghargaan bagi para insan berprestasi di bidang peternakan. Seperti Inseminator Berprestasi, Dokter Hewan Berprestasi, Beberapa Perusahaan Eksportir dan banyak lagi, penghargaan diserahkan langsung oleh Dirjen PKH disaksikan Wakil Menteri Pertanian dan Bupati Bogor. **Humas Ditjen PKH**



Nusantara Melon Fest 2025,

Pelampiasan Gejolak Anak Muda Kuningan

Nusantara Melon Fest 2025 pertama menjadi ajang anak muda Kuningan unjuk gigi dalam sebuah event nasional. Apalagi dalam ajang yang akan berlangsung pada 17-19 Oktober mendatang juga akan menggandeng kalangan UMKM dan mengangkat budaya daerah, khususnya Kuningan.

Kabupaten Kuningan memang bukanlah sentra pangan seperti kabupaten tetangganya Cirebon dan Brebes. Berada di Kaki Gunung Ciremai, tofografi kabupaten ini lebih banyak perbukitan dan pegunungan, terutama bagian Barat dan Selatan dengan ketinggaian berkisar 700 meter di atas permukaan laut. Sedangkan wilayah bagian timur dengan ketinggian antara 120-200 meter di atas permukaan laut.

Tofografi tersebut menjadi salah satu faktor yang menentukan dalam pola penggunaan lahan untuk pertanian. Meski selama ini tak masuk dalam perhitungan sebagai salah satu sentra utama pangan, khususnya beras, tak menghalangi anak-anak muda di Kabupaten Kuningan unjuk gigi dalam dunia pertanian.

Seperti Pipin Arifin yang mengaku resah terhadap generasi muda yang mulai meninggalkan dunia pertanian dan budaya daerah. Meski berlatar belakang pekerjaan di dunia konstruksi yang digeluti selama 19 tahun, tak membuat Kang Pipin, sapaan akrabnya, berkecil hati menekuni dunia pertanian.

Wabah Covid-19 membuat dirinya meninggalkan dunia konstruksi dan balik kampung. Dari hobi makan melon, Kang Pipin bersama sang istri akhirnya mencoba menanam melon di lahan terbatas. “Awalnya saya coba-coba, ternyata bertani enak juga. Ada sebuah kepuasan ketika biji kecil, tumbuh menjadi kecambah dan akhirya menghasilkan buah. Ini menjadi titik balik, kenikmatan hidup, lebih tenang, slow living,” tuturnya.

Dari kesadaran tersebut, Kang Pipin pun ingin menularkan kepada anak-anak muda di daerahnya ketimbang mereka harus pergi ke kota besar hanya sebagai buruh. Dengan lahan kecil dan green house 2-3 meter yang dibuat sendiri, ia membudidayakan melon dengan sistem machida. “Saya pernah belajar budidaya melon sistem machida, satu tanaman bisa berbuah tidak hanya 1, tapi bisa 5-10 buah,” katanya.

Kini dengan bendera e-QuaNik, Kang Pipin telah mempunyai jaringan cukup luas mencapai 78 mitra di seluruh Indonesia, satu berada di Malaysia. Bahkan pasar melon premium dari jaringannya mampu menguasai 60 persen di pasar modern seperti Farmers Market, Total Buah dan Aeon.

Untuk mengangkat melon premium dari Kuningan, Kang Pipin pun menginisiasi 1# Nusantara Melon Fest yang ada digelar di salah satu tempat wisata di Kuningan yakni Arunika Eatry di Jalan Cigugur-Palutungan, Cisantana, Kecamatan Cigugur. “Awal kami ingin menyelenggara Melon Fest rintangannya luar biasa, ada yang tidak suka, bahkan mencoba menjatuhkan,” katanya.

Namun dengan semangat anak-anak muda Kuningan dan kolaborasi berbagai pihak, Kang Pipin bersama tim dari e-QuaNik tetap berjalan. Dengan melakukan Pre-Eventi 1 di Kuningan, kemudian berlanjut dengan Pre-Event ke-4, terakhir puncaknya Pre-Event ke-5 yang berlangsung di Gedung Auditorium Kementerian Pertanian, Kamis (18/9).

Direncanakan 1# Nusantara Melon Fest akan berlangsung pada 17-19 Oktober 2025. Pada acara juga akan berlangsung Agribisnis Expo dan pameran budaya, khususnya Kuningan.

Bahkan untuk menggelar ajang bertaraf nasional ini, Kang Pipin mengaku tidak melibatkan event organizer. Ia mencoba merangkul anak-anak muda supaya bisa membuat konsep event dan berbagai kalangan. “Bagi kami tidak perlu hebat untuk memulai, tapi bagaimana kita memulai untuk menjadi hebat,” tegasnya.

Untuk memberdayakan UMKM, Kang Pipin mengajak hampir 100 UMKM sebagai pilot project. “Kami merangkul UMKM, termasuk mereka yang menjadi pengrajin batik asli kuningan seperti Batik Paseba, Bojong Asri dan Batik Mesa. Bahkan UMKM yang ajak bukan lah mereka yang sudah besar, tapi masih embrio dan masih perlu banyak belajar dan bimbingan,” tuturnya.

Sementara itu Direktur Buah dan Biofarmaka, Ditjen Hortikultura, Kementerian Pertanian, Liferdi Lukman berharap Nusantara Melon Festival ini dapat menggerakkan ekonomi di Kuningan. Menurutnya, sepanjang tahun 2020-2025, khususnya saat Covid-19, banyak yang mencari buah melon, karena menjadi salah satu cara meningkatkan imunitas tubuh.

Selama periode tersebut, terjadi peningkatan produksi yang cukup tinggi, terutama tahun 2024 naik dari 117 ribu ton menjadi 135 ribu ton. Kementerian Pertanian juga sudah mengembangkan melon 20 ha tahun 2023 dan 25 ha di tahun 2024, serta membangun green house sebanyak 21 unit melalui dana DAK.

Dengan E-QuaNik melalui pertanian modern, Liferdi mengatakan, pertanian menjadi potensi usaha yang luar biasa, apalagi dengan menggunakan teknologi. Kementerian Pertanian sudah menerapkan IoT di 31 green house yang merupakan hasil kerjasama dengan Kominfo.

“Ini sudah dilakukan anak-anak muda di Kuningan, kami berikan apresiasi untuk e-QuaNik,” ujarnya. Seperti Tomohon Festival Flower yang kini menjadi event internasional, Liferdi berharap Nusantara Melon Fest juga menjadi event yang berkelanjutan.

Sementara itu Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Pangan Nasional, Andriko Noto Susanto mengakui dirinya tertarik dengan adanya gerakan mandiri pangan dari generasi muda di Kuningan ini. “Spirit ingin mandiri pangan. Kami kampanyekan makan buah lokal. Salah satunya melon,” katanya. Bahkan Andriko menegaskan, pihaknya siap mendukung kalangan UMKM Kuningan yang ingin meregistrasikan produknya.

Deputi bidang Usaha Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinasi bidang Pangan, Widiastuti juga memberikan apresiasi rencana Nusantara Melon Fest. Dengan kegiatan ini ia berharap petani milenial dan gen Z ikut berkembang dalam membangun pertanian. “Ini menjadi simbol sebuah kinerja petani milenial Indonesia,” ujarnya.

Pemerintah katanya, telah menetapkan target pencapaian ketahanan pangan dan mandiri pangan pada tahun 2027. Kemudian pada tahun 2029 mencapai kedaulatan pangan, pada akhirnya di tahun 2045 bisa mewujudkan Indonesia Emas. **Yul**



Jawab Keluhan Petani,

Impor Tapioka dan Tetes Tebu Dibatasi

Petani singkong dan tebu kini tengah menghadapi ujian berat. Meski pemerintah telah menetapkan dua komoditas tersebut sebagai produk pangan strategis, tapi nasibnya tengah terombang-ambing. Masuknya produk impor membuat harga tapioka dan tetes tebu terjun bebas.

Kondisi tersebut akhirnya membuat pemerintah menetapkan larangan terbatas impor tepung tapioka dan tetes tebu. Kebijakan ini setelah pemerintah bertemu dengan pelaku usaha singkong dan tebu, baik petani maupun kalangan industri di Jakarta, Jumat (19/9).

"Sesuai arahan Presiden, ethanol kita keluarkan keputusan larangan terbatas. Impor kita keluarkan sesuai kebutuhan. Kalau dalam negeri masih bisa terpenuhi, impor ditiadakan," kata Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. Begitu juga dengan singkong, pemerintah akan menerbitkan larangan terbatas untuk tepung tapioka. "Jadi selama kebutuhan dalam negeri masih dapat dipenuhi, impor tidak akan diperbolehkan," tegasnya.

Menindaklanjuti kebijakan larangan terbatas impor tapioka dan ethanol, Menteri Perdagangan Budi Santoso menerbitkan dua Permendag. Pertama, Permendag No. 31 Tahun 2025 (amandemen Permendag No. 18 Tahun 2025). Kebijakan tersebut mengatur impor ubi kayu dan turunannya seperti tapioka.

Persetujuan Impor (PI) hanya untuk pemegang API-P, dengan rekomendasi teknis dari Kementerian Perindustrian atau Neraca Komoditas. Selain itu, impor disesuaikan dengan kebutuhan nasional untuk melindungi petani singkong.

Kedua, Permendag 32/2025 (amandemen Permendag 20/2025): Memperketat impor etanol untuk menjaga stabilitas harga molases, melindungi petani tebu, dan mendukung swasembada gula serta energi hijau. Kedua Permendag ini berlaku 14 hari setelah diundangkan.

Krisis harga singkong mulai mencuat pada Januari 2025, dipicu banjir impor tepung tapioka yang menyebabkan hasil panen lokal tidak terserap. Pada 23 Januari, ribuan petani singkong dari tujuh kabupaten di Lampung sempat menggelar aksi protes di pabrik pengolahan tepung tapioka, menuntut harga sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) sebesar Rp 1.400/kg.

Apalagi harga singkong petani terkena potongan harga 50–60% dari harga minimum Rp 1.350/kg. Dengan demikian, harga jual singkong petani hanya sekitar Rp 600–700/kg. Kondisi tersebut membuat petani makin sulit mengembalikan modal.

Meski petani singkong sempat melancarkan aksi unjukrasa, tapi sejak Mei 2025 harga singkong malah terus tertekan, terutama di Lampung sebagai sentra produksi yang menyumbang 70% produksi Indonesia. Kalangan industri tetap lebih memilih tapioka impor.

Serap Produk Petani

Ketua Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI), Dasrul Aswin berharap dengan kebijakan ini industri lebih fokus menyerap hasil produksi dalam negeri, sehingga petani mendapatkan kepastian pasar. Tidak hanya itu, Dasrul juga mengatakan dukungan penuh pemerintah terhadap komoditas singkong akan semakin memacu semangat petani untuk meningkatkan produksi.

Dengan dihentikannya impor, Dasrul berharap hasil panen petani akan lebih banyak diserap industri untuk diolah. Kondisi ini diyakini akan menjaga kestabilan harga sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. "Kalau impor dihentikan, otomatis hasil kami akan lebih banyak dibeli industri untuk diolah, sehingga harga stabil dan petani lebih sejahtera," katanya.

Data Kementerian Pertanian, rata-rata produksi singkong nasional pada lima tahun terakhir (2020-2024) sebesar 15,7 juta ton per tahun. Pada 2024, produksi singkong sebesar 15,1 juta ton cenderung turun dibanding produksi pada 2020 dan 2023 yang masing-masing mencapai 16,2 juta ton dan 16,7 juta ton.

Sementara angka impor cenderung naik dan angka ekspor cenderung turun. Pada Tahun 2024 menunjukkan angka impor menembus 277 ribu ton. Angka tersebut menandakan kebutuhan dalam negeri belum mampu dipenuhi, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas bahan baku.

Sementara itu Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, kontribusi produksi singkong Lampung hampir 70 persen dari produksi Indonesia. Meski Lampung menjadi sentra terbesar produksi singkong di Indonesia, namun harga singkong terus tertekan. Hal ini akibat masuknya impor tepung tapioka dan singkong yang membuat produk lokal sulit bersaing.

"Dalam beberapa waktu belakangan ini harga tepung tapioka dunia yang menurun dan masuknya impor membuat harga di dalam negeri turun di Lampung dan seluruh Indonesia. Ini membuat petani singkong mengeluh," tuturnya.

Dengan kebijakan larangan terbatas, Rahmat berharap akan menaikkan harga tepung singkong di Lampung. "Kami juga meminta harga Eceran Tertinggi tepung tapioka diberlakukan agar rantai dagang benar-benar terkendali dan menguntungkan petani," ujarnya. **Yul**

Keuntungan Tetes Tebu Tak Menetes ke Petani

Selain petani singkong, petani tebu juga mengeluhkan hal yang sama. Kebijakan pemerintah yang membuka impor ethanol dan tetes tebu justru makin menekan pendapatan petani tebu. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Fatchudin Rosidi, kebijakan pemerintah membuka impor tetes tebu dan ethanol dari Thailand membuat harga tetes tebu terjun bebas.

Harga tetes tebu yang tahun lalu bisa mencapai Rp 2.100/kg, maka kini turun menjadi Rp 1.700, kemudian Rp 1.200, bahkan menjadi Rp 900/kg.

Menurutnya, setiap musim giling petani tebu akan mendapatkan pendapatan dari dua produk yakni gula dan tetes tebu. Selama ini pembagian tetes tebu petani dengan pabrik gula, setiap 1 kuintal tebu, petani akan mendapatkan 3 kg tetes tebu. Setiap tahun produksi tetes tebu petani mencapai 1,6 juta ton.

Fatchudin berharap perhatian pemerintah tidak hanya sebatas regulasi, tetapi juga melalui dukungan subsidi serta penyelesaian berbagai kendala di lapangan. Hal ini mencakup persoalan pabrik gula hingga pemasaran hasil produksi yang selama ini menjadi tantangan utama petani tebu. **Yul**



Program Makan Bergizi Gratis: **Ambisi Besar, Ujian Nyata**



Oleh :
Aki Dudi, Pangebon Kelor

Pada awal 2025, pemerintah Indonesia meluncurkan sebuah program ambisius bernama Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini digadang-gadang sebagai jawaban atas masalah gizi kronis bangsa—dari stunting, malnutrisi, hingga rendahnya kualitas sumber daya manusia. Targetnya luar biasa: dalam lima tahun, 83 juta anak sekolah, balita, ibu hamil, dan menyusui akan menjadi penerima manfaat.

Namun, setelah beberapa bulan berjalan, jalan program ini ternyata tidak semulus harapan. Sejumlah persoalan mulai mengemuka, memperlihatkan jurang yang cukup lebar antara visi besar dan realitas di lapangan.

Salah satu sorotan tajam muncul dari soal anggaran. Jika awalnya pemerintah menjanjikan Rp15 ribu untuk setiap porsi makanan, belakangan jumlah itu dipangkas menjadi Rp10 ribu. Dampaknya langsung terasa pada menu yang disajikan: porsi semakin kecil, variasi berkurang, dan kandungan gizi pun ikut terpangkas. Di tengah beban fiskal negara yang kian berat, kekhawatiran muncul bahwa program ini bisa menjadi beban jangka panjang bagi APBN.

Masalah lain datang dari urusan logistik. Indonesia adalah negara kepulauan dengan ribuan pulau dan kondisi infrastruktur yang tidak merata. Di sejumlah daerah, distribusi makanan sering terlambat. Anak-anak sekolah bahkan sempat menunggu lama hanya untuk mendapatkan jatah makan siang. Apa yang di atas kertas terlihat rapi, di lapangan berubah menjadi kerumitan.

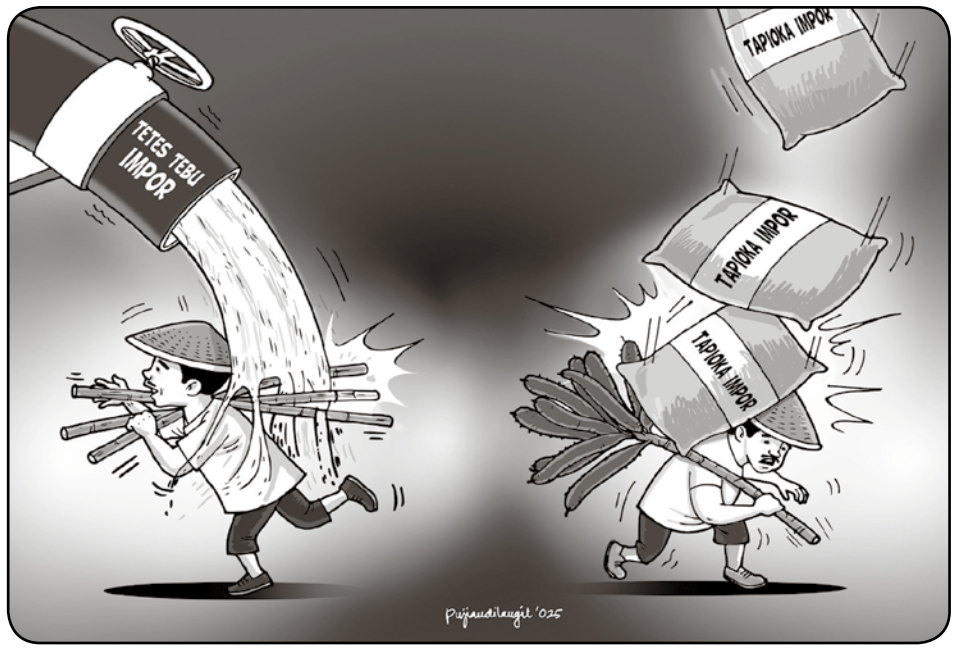
Kualitas makanan juga menjadi bahan perbincangan. Banyak siswa mengeluh soal menu yang hambar dan monoton. Lebih serius lagi, sejumlah kasus keracunan massal mencoreng wajah program ini. Ribuan anak di beberapa daerah dilaporkan sakit setelah mengonsumsi makanan yang seharusnya menyehatkan. Kepercayaan publik pun goyah, bahkan sebagian orang tua mulai khawatir anak mereka ikut menjadi korban.

Di sisi lain, persoalan food waste tak kalah mencolok. Tidak sedikit makanan berakhir di tempat sampah karena tak sesuai selera penerima. Penggunaan plastik sekali pakai semakin memperparah dampak lingkungan. Alih-alih menjadi solusi kesehatan, program ini justru menimbulkan masalah baru.

Namun, bukan berarti program MBG tanpa sisi terang. Beberapa sekolah melaporkan peningkatan kehadiran siswa setelah adanya makan siang gratis. Anak-anak yang sebelumnya sering absen kini lebih rajin masuk kelas. Bukti kecil ini menunjukkan bahwa meskipun jauh dari sempurna, program tetap punya potensi membawa dampak positif.

Agar program ini tidak terjebak dalam lingkaran masalah yang sama, sejumlah ahli menyarankan perubahan pendekatan. Desentralisasi menjadi kunci: pemerintah daerah, sekolah, dan petani lokal perlu lebih diberdayakan agar makanan sesuai dengan budaya dan selera setempat. Teknologi juga bisa dimanfaatkan untuk memantau distribusi, kualitas, sekaligus transparansi anggaran secara real-time. Di saat yang sama, sekolah sebaiknya menjadikan program ini bukan sekadar pembagian makanan, tetapi juga sarana edukasi gizi seperti yang sudah lama diterapkan Jepang melalui konsep *Shokuiku*.

Pada akhirnya, keberhasilan MBG tidak bisa diukur hanya dari berapa banyak porsi makanan yang dibagikan. Yang lebih penting adalah bagaimana program ini mampu menghadirkan gizi seimbang, makanan yang aman, keterlibatan komunitas, serta dampak ekonomi yang berkelanjutan. Jika semua itu tercapai, program ini bisa benar-benar menjadi investasi besar menuju Indonesia Emas 2045.



Kolom

Agar Jangan **Hanya Menanam**



Oleh: **Memed Gunawan**

Sejak zaman Kolonial negeri ini menjadi pemasok bahan baku berupa hasil perkebunan, karet, teh, kina, kopi, rempah dan banyak lagi ke negara-negara Eropa untuk diolah menjadi produk berkualitas dengan margin tinggi. Sampai saat ini produk olahan di sektor hulu dan hilir masih banyak dikuasai oleh negara-negara maju.

Negara-negara maju menguasai pertanian di hulu (benih, pupuk, pestisida) dan di hilir (pengolahan dan distribusi). Perusahaan multinasional seperti Monsanto, DuPont, Pioneer, Syngenta, Groupe Limagrain, Land O' Lakes, Bayer Crop Science, Sakata Seed Sakata, Takii Seed, DLF-Trifolium DLF Groupe adalah perusahaan raksasa yang menguasai pertanian di hulu dan di hilir.

Lalu bagaimana agar kita tidak hanya menjadi kuli tanam, yang mengalami ketergantungan dalam sarana produksi, dan lemah dalam pengolahan hasil dan pemasaran?

Jumlah perusahaan benih di Indonesia tidak spesifik disebutkan tapi Asosiasi Benih Indonesia (Asbenindo) memiliki 72 perusahaan anggota yang terdaftar, yang meliputi perusahaan swasta nasional, BUMN, dan multinasional, yang mungkin dapat memberikan gambaran tentang jumlah pelaku di industri benih. Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan Indonesia (MPPI) menghimpun pelaku usaha, pemerintah, dan lembaga penelitian di sektor perbenihan dan perbibitan untuk memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan guna mewujudkan kemandirian perbenihan nasional, meningkatkan ketahanan pangan, serta mendorong adopsi teknologi dan inovasi dalam produksi benih dan bibit.

Persentase petani yang menggunakan benih unggul bersertifikat bervariasi menurut data dan jenis komoditas, namun target pemerintah Indonesia adalah lebih dari 50% dan terus diupayakan untuk ditingkatkan. Data tahun 2021 menunjukkan petani Indonesia hanya memakai sekitar 13% benih bermutu. Benih bermutu bersertifikat, cenderung lebih mahal dan sulit diakses oleh petani kecil karena diimpor atau karena proses perbanyakannya yang rumit. Khusus kebutuhan benih padi bersertifikat di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 300.000 ton per tahun untuk sekitar 12 juta hektar sawah. Kapasitas pabrik benih padi nasional sudah bisa mencukupi hampir setengah dari kebutuhan tersebut.

Tidak diragukan pengembangan industri pendukung di sektor hulu seperti perbenihan dan industri sarana produksi lainnya merupakan faktor kunci untuk mencapai produktivitas dan kualitas hasil panen yang tinggi, serta efisiensi usahatani secara keseluruhan. Upaya ini harus didukung oleh penelitian yang konsisten karena terbukti investasi di bidang penelitian sangat menguntungkan dengan tingkat pengembalian investasi antara 30% hingga 75%. Penyuluhan yang efektif diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan petani tentang pentingnya benih unggul bersertifikat, sehingga mendorong penggunaannya dalam praktik pertanian mereka.

Pengembangan sektor hilir pertanian juga menjadi prioritas karena margin terbesar ada di bidang pengolahan dan distribusi. Teknologi bukan lagi menjadi kendala karena bisa dibeli, tetapi agar sektor swasta lebih aktif berinvestasi dalam inovasi pertanian, perlu ada dukungan finansial, fasilitasi informasi pemasaran dan kebijakan yang melindungi hak kekayaan intelektual tanpa menghalangi petani kecil untuk mengakses teknologi baru.

Sugeng Wahyudi

Catatan Seorang **Peternak**

Sugeng Wahyudi hadirkan buku 'Catatan Harian Seorang Peternak 2015–2025', membuka tabir suka duka, harga ayam fluktuatif, dan perjuangan peternak rakyat. Buku ini merekam refleksi dan pengalaman jatuh bangun peternak rakyat selama satu dekade terakhir, sekaligus menjadi cermin perjuangan mereka menghadapi dinamika industri ayam dan telur nasional.



Dunia perunggasan rakyat di Indonesia memiliki kisah panjang yang jarang terekspos ke publik. Untuk itu, Sugeng Wahyudi, seorang peternak mandiri sekaligus Sekjen Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN), meluncurkan buku berjudul Catatan Harian Seorang Peternak 2015–2025 pada Rabu (17/9) di ICE BSD.

Sugeng menjelaskan, ide penulisan buku ini lahir dari keresahan seorang peternak kecil yang kerap menghadapi persoalan klasik, mulai dari ketidakseimbangan suplai dan permintaan, fluktuasi harga ayam, hingga lemahnya perlindungan bagi peternak rakyat.

"Buku ini bukan sekadar catatan pribadi, tetapi hasil interaksi, diskusi, dan pengalaman bersama komunitas. Harapannya, apa yang saya tulis bisa menjadi pelajaran sekaligus refleksi bagi kita semua," ujar Sugeng saat sambutan.

Menurut Sugeng, perjalanan peternak rakyat telah melewati berbagai fase. Mulai dari era 1970–1980 ketika pemerintah membatasi jumlah pemeliharaan ayam, hingga era liberalisasi industri yang membuka akses bagi semua pelaku usaha. Namun, kondisi saat ini justru menghadirkan tantangan baru berupa kepemilikan yang semakin timpang dan persaingan yang tidak sehat.

Buku ini terbagi menjadi dua bagian besar: catatan teknis dan non-teknis. Catatan teknis memuat pengalaman tentang manajemen kandang, sarana produksi, hingga infrastruktur peternakan.

Sedangkan catatan non-teknis menyoroti persoalan struktural, seperti validitas data, kebijakan harga, dan pentingnya peran koperasi serta asosiasi peternak. "Asosiasi itu penting, karena di sana ada ruang diskusi, akumulasi pemahaman, dan upaya menyamakan persepsi untuk mencapai tujuan bersama," tegas Sugeng.

Sugeng juga menekankan perlunya kehadiran negara, terutama BUMN seperti Berdikari, sebagai stabilisator harga sekaligus off-taker produk peternakan. "BUMN jangan hanya jadi penonton. Negara harus hadir untuk memastikan peternak kecil tidak tersisih," jelasnya.

Ia berharap pemerintah lebih adil dalam memperhatikan peternak rakyat, termasuk menjalankan kebijakan kompensasi 50:50 antara perusahaan besar dan peternak mandiri. "Silakan yang besar tetap membesar, tapi yang kecil jangan sampai mati. Kesejahteraan harus kita nikmati bersama," tambahnya.

Apresiasi dari berbagai pihak

Ketua GOPAN, Herry Dermawan, menyebut karya Sugeng sebagai inspirasi sekaligus pengingat bagi generasi muda perunggasan. "Menulis buku itu tidak gampang. Saya lebih sanggup bicara lima jam daripada menulis dua lembar. Jadi ini karya luar biasa," ujar Herry sambil bercanda. Karenanya, Ia berharap buku ini tidak hanya menjadi dokumentasi perjalanan peternak, tetapi juga memantik semangat untuk memperbaiki masa depan industri perunggasan nasional.

Apresiasi juga datang dari Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda yang menilai buku Sugeng sebagai catatan penting perjalanan perunggasan rakyat dalam satu dekade terakhir.

"Selamat untuk Pak Sugeng atas peluncuran bukunya. Semoga buku ini bisa memberikan warna dan perbaikan bagi kita semua. Setiap kebijakan yang kami ambil selalu mendengar masukan peternak, dan buku ini menjadi salah satu refleksi berharga," ujarnya.

Agung menambahkan, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan peternak rakyat menjadi kunci untuk menjaga harga ayam tetap stabil.

Tidak kalah penting, Mohamad Sarkawi, mantan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), menilai buku ini sebagai refleksi panjang tentang perjuangan peternak rakyat menghadapi dinamika industri perunggasan. "Menulis itu pekerjaan sulit, apalagi bagi seorang peternak yang setiap hari sibuk di kandang. Apa yang dilakukan Pak Sugeng ini luar biasa dan patut diapresiasi," katanya.

Sarkawi menekankan pentingnya efisiensi dalam produksi ayam agar peternak rakyat bisa bertahan di tengah fluktuasi harga, kesulitan akses DOC dan pakan, serta persaingan dengan perusahaan integrator besar.

Lebih lanjut, Sarkawi menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai peluang besar bagi peternak kecil. Dengan target 92,6 juta penerima, pasar ayam dan telur akan terbuka luas. "Yang harus kita perjuangkan, jangan sampai pasar MBG ini hanya dikuasai integrator besar. Peternak rakyat harus menjadi bagian dari rantai pasoknya," tegasnya.

Buku setebal 106 halaman ini dinilai penting tidak hanya bagi peternak, tetapi juga generasi muda yang ingin belajar tentang jatuh-bangun industri perunggasan. "Dengan membaca buku ini, kita tidak perlu mengalami sendiri kesulitan yang dialami peternak. Pengalaman panjang Pak Sugeng sudah bisa jadi pelajaran berharga," pungkas Sarkawi.

Peluncuran buku ini sekaligus menjadi momentum bagi peternak rakyat untuk menyuarakan aspirasi, menyoroti ketimpangan industri, dan mempromosikan kerjasama yang adil antarsemua pihak. Sugeng Wahyudi melalui karyanya membuktikan bahwa pengalaman pribadi dapat diubah menjadi pembelajaran kolektif yang bermanfaat bagi seluruh ekosistem perunggasan di Indonesia. **Gsh**



BIOCHAR,
Solusi Jitu Benahi Lahan Rawa



Lahan rawa di Indonesia memiliki potensi pengembangan pertanian yang sangat tinggi karena sangat luas dan memiliki sumberdaya air yang berlimpah. Data Kementerian Pertanian menyebutkan, luas lahan rawa mencapai 34.1 juta ha, sekitar 20 juta ha berpotensi untuk pertanian dan sekitar 10 juta ha siap dibuka untuk pertanian utamanya lahan sawah.



Namun demikian, lahan rawa umumnya termasuk lahan marginal dan kurang subur, sehingga pemanfaatannya untuk pertanian menghadapi berbagai kendala fisik. Diantaranya, kemasaman tinggi (pH rendah), tingginya kandungan zat beracun (Fe, senyawa sulfat, asam organik, dan lain-lain), sehingga tanaman mudah mengalami keracunan besi, asam sulfat, dan asam-asam organik.

Dengan demikian untuk meningkatkan kesuburan tanahnya mutlak perlu ameliorasi tanah. Ameliorasi adalah upaya pembenahan kesuburan tanah melalui penambahan bahan-bahan tertentu. Sedangkan amelioran adalah bahan yang dapat meningkatkan kesuburan tanah melalui perbaikan kondisi fisik dan kimia. Inovasi terkini yang paling berpotensi untuk ameliorasi tanah-tanah rawa adalah biochar.

Apa itu Biochar?

Biochar adalah arang yang dihasilkan dari proses pembakaran bahan organik (biomassa) pada kondisi terbatas atau tanpa oksigen (pirolisis). Bahan bakunya dapat berupa limbah pertanian seperti sekam padi, tempurung kelapa, tongkol jagung, serbuk gergaji, atau limbah organik lainnya.

Keunggulan biochar terletak pada struktur porinya yang mampu memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Selain itu, biochar juga dapat menjadi agen sekuestrasi karbon dan menyimpannya di dalam tanah dengan durasi lama sekali (lebih dari 1.000 tahun). Dengan demikian, biochar selain dapat menyuburkan tanah, ia juga dapat menekan emisi gas rumah kaca ke atmosfer.

Di lahan rawa, bahan baku biochar berlimpah. Diantaranya, sekam padi, jerami padi, jerami jagung, tongkol jagung, kalakai, karamunting, galam, bambu, bungkil sawit, daun sawit, pelepah sawit, tandan sawit, tempurung kelapa, purun tikus, dan bahan organik lainnya.

Kadar lignin tertinggi terdapat pada kalakai (35,76%) dan terendah pada jerami jagung (17,03%). Kandungan lignin yang tinggi menyebabkan bahan organik sulit terdekomposisi. Kadar selulosa tertinggi terdapat pada bungkil sawit (34,45%) dan terendah pada jerami jagung (17,03%).

Kondisi sebaliknya untuk kadar hemiselulosa. Hemiselulosa merupakan polimer *amorf* yang berasosiasi dengan selulosa dan lignin. Sifatnya mudah mengalami depolimerisasi, hidrolisis oleh asam, bersifat basa, dan mudah larut air. Hemiselulosa memiliki ikatan dengan lignin lebih kuat daripada ikatan dengan selulosa dan mudah mengikat air. Kadar hemiselulosa berbeda pada jenis kayu berdaun jarum dan kayu berdaun lebar.

Aplikasi Biochar

Petani biasanya menggunakan bahan baku biochar yang tersedia di sekitar lahannya, yaitu berupa limbah sisa panen. Petani padi menggunakan bahan baku sekam padi, petani jagung memanfaatkan tongkol jagung, petani sawit bahan baku biocharnya berupa tempurung, tandang kosong, pelepah dan daun sawit.

Di lahan sawah bukaan baru, banyak sekali tunggul-tunggul atau kayu-kayu sisa pohon yang sering menjadi masalah bagi petani. Bahan-bahan tersebut merupakan bahan baku biochar kualitas tinggi. Selain itu mereka juga biasa menggunakan biomasa dari gulma berupa tanaman paku-pakuan, rumput-rumputan, dan lain-lain.

Dosis dan cara pemberian biochar tergantung kualitas biochar, kondisi tanah dan komoditas yang akan diusahakan. Untuk tanaman pangan dan hortikultura dosis aplikasi sekitar 5-20 ton/ha biochar biasa atau 1-5 ton/ha biochar yang diaktivasi (*activated biochar*).

Untuk tanaman yang jarak tanamnya rapat (padi, gandum, kentang, jahe, dan lain-lain) biochar diaduk dengan tanah saat pengolahan tanah. Sementara itu untuk tanaman yang jarak tanamnya renggang (jagung, cabai, dan lain-lain), biochar dibenamkan di parit atau solokan dekat lubang tanam.

Demikian pula untuk tanaman yang jarak tanamnya jauh seperti tanaman pohon (sawit, kakao, kopi, karet, dan lain-lain), biochar dibenamkan di solokan yang mengelilingi pohon dengan diameter menyesuaikan dengan tajuk tanaman.

Manfaat Biochar

Hasil penelitian menunjukkan, penggunaan biochar di tanah-tanah rawa dapat meningkatkan produktivitas padi 15–60%. Bahkan menurunkan emisi gas rumah kaca (metan), serta meningkatkan efisiensi pupuk kimia hingga 30%.

Aplikasi biochar sekam padi meningkatkan hasil padi di lahan pasang surut dari 4,35 menjadi 5,36 ton/ha (24%). Sedangkan di tanah gambut, peningkatan hasilnya mencapai 60%. Biochar juga memberikan peningkatkan hasil kedelai 2,5 menjadi 2,9 ton/ha (16%).

Dengan pertimbangan bahan baku yang berlimpah, teknologinya yang sederhana, dan perannya yang begitu besar dalam memperbaiki kesuburan tanah, biochar merupakan solusi jitu untuk ameliorasi tanah-tanah rawa dalam mendukung swasembada pangan.

A. Susilawati dan D. Nursyamsi

Peran Biochar dapat Memperbaiki Kesuburan Tanah Rawa

1. Meningkatkan pH tanah (mengurangi kemasaman)
2. Mengikat logam racun seperti Al^{3+} dan Fe^{2+}
3. Meningkatkan kapasitas tukar kation (KTK) tanah sehingga tanah lebih mampu menyimpan hara dan tanaman mudah menyerapnya.
4. Memperbaiki struktur tanah menjadi lebih gembur dan aerasinya membaik.
5. Meningkatkan kapasitas memegang air terutama di *upland* saat musim kemarau.
6. Mendukung kehidupan mikroorganisme penyubur tanah.

Memanaskan Masakan Berulang Kali, **Amankah?**



Bagi masyarakat Indonesia kebiasaan menghangatkan kembali masakan yang tak langsung habis sering menjadi pilihan praktis. Pertanyaannya, apakah semua jenis makanan aman jika dipanaskan berulang kali?

Dosen Departemen Gizi Masyarakat IPB University, Dr Karina Rahmadia Ekawidyani, menjelaskan, tidak semua jenis makanan aman dipanaskan berulang kali. Pada dasarnya, semua makanan yang dimasak dengan benar bisa dipanaskan kembali. Tetapi ada beberapa kategori makanan yang sebaiknya dihindari untuk dipanaskan ulang karena mengandung senyawa tertentu atau berisiko terkontaminasi bakteri.

Karina mencontohkan, beberapa jenis makanan yang dimaksud antara lain sayuran hijau atau sayuran tinggi nitrat seperti bayam, kale, wortel, lobak, dan seledri. Pemanasan ulang pada bahan tersebut dapat menyebabkan perubahan menjadi senyawa karsinogenik. Selain itu, makanan berbasis protein seperti ayam dan telur juga rentan karena berisiko mengandung bakteri *Salmonella*.

"Nasi yang sudah dingin pun dapat menjadi media berkembangnya *Bacillus cereus* bila dipanaskan ulang. Begitu juga dengan daging olahan yang berpotensi menghasilkan zat karsinogenik dari bahan pengawetnya," papar Dr Karina. Ia juga mengingatkan, makanan *buffet* atau *take away* juga perlu diwaspadai. Sebab, tidak jelas kapan dimasak dan apakah memenuhi standar keamanan pangan.

Tips Memanaskan

Lebih lanjut, Dr Karina mengatakan, risiko utama dari konsumsi makanan yang dipanaskan berulang kali adalah keracunan makanan *(food poisoning)*. Risiko ini muncul terutama jika suhu dan durasi pemanasan tidak tepat. Bakteri dapat berkembang cepat pada suhu antara 4°C–60°C.

Karena itu, ia mengatakan, pastikan suhu panas terdistribusi merata hingga ke bagian dalam makanan, bukan hanya di permukaan. Disarankan memanaskan hingga suhu bagian dalam mencapai minimal 70°C selama dua menit, 75°C selama 30 detik, atau 80°C selama 6 detik.

Selain proses pemanasan, cara penyimpanan makanan juga memegang peran penting. Menurutnya, makanan yang baru dimasak, jika tidak segera dimakan atau akan dimakan di lain waktu, sebaiknya dibagi ke dalam porsi kecil dalam kontainer tertutup rapat. Makanan sisa pun harus disimpan dalam wadah kedap udara agar aman.

"Kemudian makanan bisa disimpan dalam *chiller* selama 3–4 hari atau dibekukan dalam *freezer* hingga 3–4 bulan. Namun semakin lama disimpan, makanan berpotensi kehilangan kelembapan dan berubah rasa," ujarnya seperti dikutip dari laman *IPB University*.

Dr Karina juga mengingatkan agar masyarakat berhati-hati dalam memanaskan makanan yang disimpan. Makanan berkuah disarankan direbus hingga mendidih, sementara makanan tanpa kuah dapat dikukus, ditumis, dipanggang, atau dihangatkan dengan *microwave*, oven, maupun *air fryer*. "Perlu diingat, makanan beku yang sudah dicairkan *(thawing)* tidak boleh dibekukan kembali. Ini sangat utama untuk menjaga kualitas dan keamanan pangan," katanya. **Yul**

Daun Pisang Pembungkus Makanan, Berbahayakah?



Bagi masyarakat Indonesia, daun pisang sering kali menjadi opsi pembungkus makanan yang ramah lingkungan. Tapi, pernahkah kita bertanya tentang lapisan putih yang menempel di bawah daunnya, apakah aman atau justru berbahaya?

Menurut Dr Tjahja Muhandri, dosen Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan IPB University, lapisan putih yang kerap terlihat pada permukaan bawah daun pisang bukanlah kotoran, melainkan lilin alami atau *epikutikular wax*.

"*Epikutikular wax* ini berfungsi melindungi daun dari kehilangan air, serangan mikroorganisme, serta menjaga kelenturannya," kata Dr Tjahja dalam penjelasannya mengenai keamanan penggunaan daun pisang sebagai pembungkus makanan seperti dikutip dari laman *IPB University*.

Menurut Tjahja, lilin alami tersebut bersifat hidrofobik dan non-toksik, sehingga aman bila bersentuhan langsung dengan makanan. Bahkan, keberadaannya dapat membantu menjaga makanan agar tidak cepat lembek atau rusak. Meski demikian, ia mengingatkan daun pisang tetap perlu dicuci sebelum digunakan, terutama jika terkontaminasi tanah, debu, atau pestisida.

Ia juga menekankan pentingnya membedakan antara lilin alami dan lapisan putih yang terpisah dari daun. Jika lapisan tersebut mudah terlepas, besar kemungkinan itu adalah kapang yakni mikroba dari kelompok fungi yang memiliki filamen atau miselium. Kapang sendiri merupakan mikroba penting dalam mikrobiologi pangan. Karena itu, keberadaannya pada daun pisang perlu diwaspadai.

Dalam praktik membungkus makanan, Dr Tjahja menyarankan penggunaan bagian atas daun pisang yang licin dan mengkilap karena lebih bersih dan mudah dibersihkan. Sementara bagian bawah yang mengandung lilin putih tetap bisa digunakan, tetapi berisiko meninggalkan serbuk putih pada makanan.

Untuk mengurangi lapisan lilin tersebut, ia menyarankan, daun pisang dapat dibersihkan dengan kain bersih yang sedikit lembap. Setelah itu, proses pelayuan dengan api kecil atau air panas dianjurkan agar daun menjadi lebih lentur dan tidak mudah sobek saat digunakan sebagai pembungkus. **Yul**

Tak Malu Pegang Cangkul, Zahra Buktikan Bertani Bisa Hits

Tak malu pegang cangkul, Zahra Amalina mantan artis kini jadi petani modern. Bahkan Ia membuktikan bertani bisa hits, berkelas, sekaligus jadi jalan emas generasi muda membangun ketahanan pangan Indonesia.



Profesi petani kerap dipandang sebelah mata. Namun stigma itu pelan-pelan runtuh berkat kehadiran sosok Zahra Amalina. Perempuan kelahiran 1995 yang dulu akrab dengan sorot lampu panggung hiburan, kini justru akrab dengan tanah, pupuk, dan cangkul.

Ia menempuh jalan tak biasa yakni meninggalkan dunia gemerlap entertainment, lalu membangun perusahaan pertanian PT Tetra Jaya Plusindo dengan misi besar mendukung ketahanan pangan nasional. “Dulu mana ada artis mau nyangkul. Tapi ini bukan tentang gengsi, ini tentang pilihan hidup yang berdampak,” ujar Zahra sambil tersenyum.

Perjalanan Zahra tak sekadar cerita tentang banting setir. Ia pernah masuk jajaran Top 5 Miss Cosmo World International di Malaysia, memenangkan kategori Best Singing Talent dan National Costume. Namun alih-alih meniti karier panjang di dunia hiburan, Zahra justru memilih menanam benih baru dalam hidupnya: menjadi petani sekaligus wirausahawan.

Ia mengakui, modal awal bisnisnya berasal dari hasil sebagai artis. Tapi prinsip mandiri membuatnya enggan bergantung pada investor eksternal. “Tidak menerima uang berlebih di luar kemampuan mengelola dan proyeksi kebutuhan. Pengalaman mengajarkan saya jangan greedy,” tegasnya.

Zahra mengibaratkan dirinya sebagai gelas kosong. Ia percaya, untuk meraih mimpi, seseorang harus selalu haus akan ilmu. “Kalau gelas kita kecil dan tidak mau belajar, akan tumpah dan tidak ada tambahannya. Tapi kalau kita membesarkan wadah kita dengan terus belajar dan rendah hati, kita bisa menerima semua ilmu,” jelasnya.

Filosofi sederhana ini membimbingnya menapaki dunia agribisnis yang penuh tantangan. Ia yakin, rezeki ibarat hujan: hanya mereka yang membuka wadah diri yang bisa menampungnya. “Lama-lama kita akan menjadi orang yang fulfill dengan diri kita sendiri. Orang pun akan memandang,” tambahnya.

Dengan tagline “Petani Muda Punya Gaya,” PT Tetra Jaya Plusindo mengubah paradigma lama: bertani bukan pekerjaan kuno. Di tangan Zahra, bertani menjadi simbol aktualisasi diri sekaligus bisnis masa depan. Perusahaannya membuka peluang kolaborasi dengan kelompok tani, mendampingi petani muda, dan mendorong mereka menjadi wirausahawan agribisnis yang inovatif.

“Pertanian tidak hanya tentang bercocok tanam, tapi juga tentang inovasi dan membangun masa depan,” tandasnya. Menariknya, Zahra tidak meninggalkan sepenuhnya dunia modern. Ia tetap aktif di media sosial, terutama Instagram @zahramelll, dengan lebih dari 282 ribu pengikut. Akunnya penuh dengan potret keseharian: dari ladang, pelatihan petani muda, hingga refleksi personal tentang perjalanan hidupnya.

Langkah Zahra menunjukkan bahwa menjadi petani tak berarti ketinggalan zaman. Justru sebaliknya, bertani bisa hits asal dikelola dengan inovasi, semangat, dan keberanian untuk menepis gengsi. **Gsh**

AGRI TIPS

Jitu Memilih Melon yang Manis



Buah melon adalah salah satu buah favorit banyak orang. Teksturnya renyah, kadar airnya tinggi, serta rasanya segar membuat melon cocok dinikmati di berbagai kesempatan. Baik sebagai pencuci mulut, campuran es buah, hingga jus yang menyehatkan, melon selalu jadi pilihan menyenangkan.

Namun, tidak semua melon di pasar memiliki rasa manis dan kualitas prima. Terkadang kita membeli melon yang tampak bagus dari luar, tetapi ketika dibelah ternyata hambar, kurang berair, atau malah terlalu lembek. Agar tidak kecewa, ada beberapa cara sederhana namun ampuh untuk memilih melon yang manis dan matang sempurna.

Pertama, perhatikan aroma buah. Melon yang matang biasanya mengeluarkan wangi khas yang cukup kuat, terutama di bagian pangkal atau bekas tangkainya. Jika aromanya harum dan segar, itu tanda bahwa buah sudah siap santap. Sebaliknya, jika tidak tercium aroma apa pun, kemungkinan buah masih mentah.

Kedua, bandingkan berat buah. Caranya mudah, ambil dua atau tiga melon dengan ukuran serupa. Melon yang terasa lebih berat menandakan kandungan airnya lebih banyak, sehingga rasanya cenderung lebih segar dan manis.

Ketiga, amati warna kulitnya. Untuk jenis melon berjaring, pilih yang warnanya kekuningan atau krem di sela-sela jaringnya, bukan hijau pekat. Sedangkan pada melon kulit halus, warna yang agak kekuningan menunjukkan tingkat kematangan yang baik.

Keempat, perhatikan jaring dan tekstur kulit. Jaring pada melon matang biasanya tampak jelas, tebal, dan merata. Cobalah tekan lembut bagian ujung buah, bukan bagian tengahnya. Jika terasa sedikit empuk, artinya buah sudah matang. Tetapi hati-hati, bila terlalu lembek justru menandakan buah sudah terlalu tua atau hampir busuk.

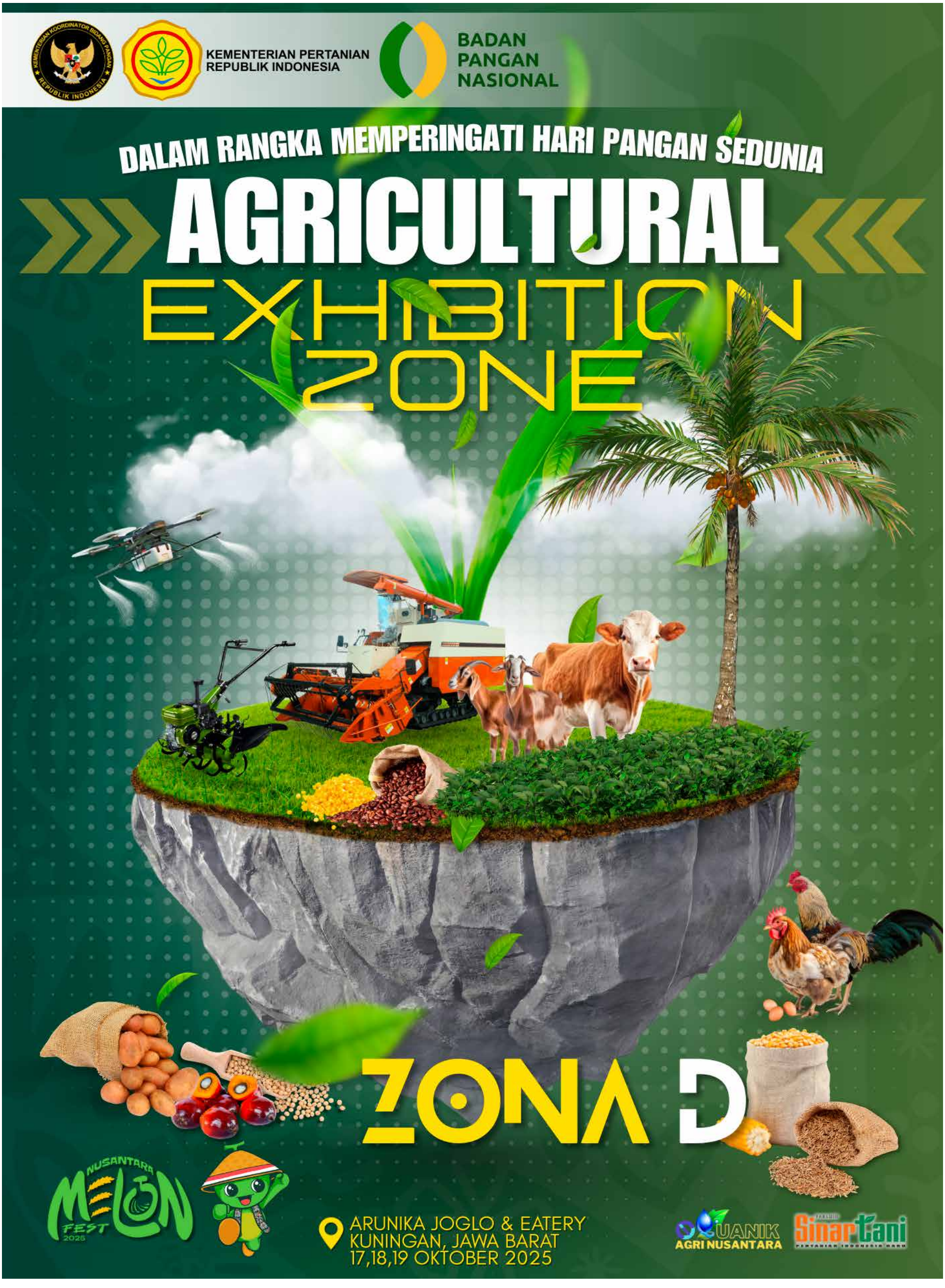
Kelima, gunakan cara sederhana: ketuk buahnya. Bunyi yang dalam dan bergema adalah pertanda daging buah sudah matang sempurna. Jika bunyinya nyaring atau terlalu kosong, kemungkinan masih mentah.

Keenam, cek bagian tangkai. Melon matang biasanya memiliki bekas tangkai yang sedikit cekung atau sudah terlepas dengan mudah. Jika tangkainya masih keras melekat, bisa jadi buah dipetik sebelum matang.

Selain itu, jangan lupa untuk memeriksa kondisi kulit buah secara keseluruhan. Pilih melon yang mulus tanpa retak besar, memar, atau bercak cokelat. Meski goresan kecil masih bisa ditoleransi, kerusakan besar biasanya memengaruhi kualitas rasa di dalamnya.

Penting diingat, tidak semua melon akan terus matang setelah dipetik. Beberapa varietas, seperti honeydew, tidak akan menjadi lebih manis setelah lepas dari pohon. Oleh karena itu, memilih melon yang matang sejak awal adalah kunci untuk mendapatkan rasa terbaik.

Herman


KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
BADAN
PANGAN
NASIONAL
DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI PANGAN SEDUNIA
AGRICULTURAL
EXHIBITION
ZONE
ZONA D
NUSANTARA MELON FEST 2025
ARUNIKA JOGLO & EATERY
KUNINGAN, JAWA BARAT
17,18,19 OKTOBER 2025
UANIK
AGRI NUSANTARA
Sinar Tani

HILIRISASI PERKEBUNAN, Dana Besar perlu Dukungan Daerah

Pemerintah kini fokus menggenjot lanjut hilirisasi perkebunan. Bahkan untuk mencapai target tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran lumayan besar mencapai Rp 10 triliun. Namun untuk keberhasilan program tersebut peran pemerintah daerah sangat penting.



Senin (22/9), sejumlah Gubernur dan Bupati/ Walikota dikumpulkan Menteri Pertanian, Andi Amran dalam Rapat Koordinasi Hilirisasi Perkebunan, di Kantor Pusat Kementan, Jakarta Selatan. Pertemuan yang dihadiri Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian tersebut untuk mengambil langkah dalam program hilirisasi komoditas strategis.

Beberapa komoditas perkebunan yang menjadi sasaran pemerintah meliputi tebu, kelapa, kelapa sawit, kakao, kopi, karet, jambu mete, pala, dan lada. Komoditas tersebut memiliki peranan vital sebagai penyumbang devisa negara, penyerap tenaga kerja, pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta mendukung ketahanan pangan.

Data menunjukkan nilai ekspor komoditas perkebunan pada tahun 2024 mencapai Rp279,4 triliun atau sebesar 92,26 persen dari total ekspor pertanian yang mencapai Rp302,8 triliun. Seperti diketahui Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Pertanian untuk menggenjot, hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat.

"Kita ingin kembalikan kejayaan rempah-rempah, komoditas perkebunan. Anggarannya sudah ada sekitar Rp 10 triliun. Dukungan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi kunci keberhasilan hilirisasi," kata Amran saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan tersebut.

Dalam program hilirisasi tersebut, Kementerian Pertanian memperoleh Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sekitar Rp10 triliun pada tahun 2025 dan dua tahun ke depan. Anggaran tersebut mencakupi pemberian benih untuk lahan 800.000 hektar (ha) hingga peremajaan tanaman perkebunan.

Amran berharap dengan program hilirisasi, ke depan Indonesia tidak lagi mengekspor produk mentah, tetapi telah menjadi produk turunan. Dengan hilirisasi, nilai ekspor diharapkan juga dapat terdongkrak. "Contohnya kita ekspor kacang mete, kakao dengan nilai Rp26.000 per kilogram. Di Singapura diolah menjadi cokelat harganya bisa Rp1 juta. Ini akan kita hilirisasi. Jangan biarkan komoditas pertanian keluar tanpa melalui processing," ungkapnya.

Selain itu, Amran mengungkapkan, dengan program hilirisasi dapat menggerakkan industri dan menyerap tenaga kerja. Dari program hilirisasi ini, pemerintah menargetkan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,6 juta orang dan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pertanian sebesar 1,02 persen serta PDRB total sebesar 0,14 persen.

Program Wajib Daerah

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, sektor pertanian harus menjadi program wajib daerah. Langkah ini dinilai krusial sebagai kunci memperkuat ketahanan pangan sekaligus pengungkit utama Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (*middle income trap*).

Tito menegaskan, sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah, dirinya akan memastikan kepala daerah menunjukkan keseriusannya dalam mendukung program pertanian, khususnya hilirisasi. Baginya, hilirisasi bukan hanya soal peningkatan produksi, tetapi juga strategi keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. "Kita ingin bisa cukup pangan sendiri dan bisa keluar dari negara middle income dengan hilirisasi atau industrialisasi bidang pertanian," katanya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sektor pertanian masih dikategorikan sebagai salah satu dari 32 urusan konkuren yang bersifat opsional. Artinya, pemerintah daerah baru dapat menjalankan program pertanian apabila memiliki kapasitas dan sumber daya yang memadai.

Namun ke depan, Mendagri Tito menegaskan, paradigma ini perlu diubah agar pertanian sejajar dengan program wajib lain seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, kepala daerah memiliki tanggung jawab yang jelas untuk menempatkan pertanian sebagai prioritas pembangunan di wilayah masing-masing. "Kita sedang mengupayakan kalau bisa direvisi UU ini, yang pertanian dari opsional menjadi wajib. Negara kita berbasis agriculture tradisional, kita dorong menjadi industri," ujarnya.

Lebih jauh, Tito menekankan bahwa industrialisasi pertanian menjadi kunci bagi Indonesia untuk memperkuat daya saing ekonomi sekaligus keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan yang menghasilkan produk bernilai tambah akan terus didorong.

Contohnya, Selandia Baru yang berhasil menjadi salah satu negara paling sejahtera di dunia dengan mengandalkan sektor agrikultur dan peternakan. Negara tersebut mampu mengolah produk turunannya seperti susu, keju, dan yogurt hingga menjadi komoditas unggulan yang mendunia.

Jika pertanian benar-benar dijadikan program wajib daerah, Tito yakin Indonesia tidak hanya akan mampu memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga menjadi pemain utama di pasar global melalui produk hilir bernilai tambah. Dengan begitu, target untuk keluar dari jebakan negara menengah pada 2045 semakin nyata untuk diwujudkan. "Ini bisa mengangkat kita keluar dari jebakan negara kelas menengah, lebih cepat dari prediksi di 2045," ujarnya. **Yul**

Sherly: Maluku Utara Siap Percepat Hilirisasi



Dukungan terhadap percepatan hilirisasi komoditas perkebunan terus mengalir dari berbagai daerah. Seperti Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda Laos yang menegaskan kesiapan Maluku Utara mendukung percepatan hilirisasi, khususnya pada komoditas kelapa, pala, dan cengkeh yang telah lama menjadi unggulan daerah.

"Kami sangat mengapresiasi program percepatan hilirisasi ini. Maluku Utara siap mendukung, khususnya pada komoditas kelapa, pala, dan cengkeh yang sudah lama menjadi unggulan daerah," kata Sherly.

Sherly mengungkapkan, dukungan tersebut akan diwujudkan melalui pemenuhan data calon petani dan calon lokasi (CPCL) secara by name, by address yang akurat. Hilirisasi perkebunan baginya sangat penting digarap agar komoditas unggulan tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, melainkan diolah menjadi produk turunan bernilai tambah.

Dengan demikian, kesejahteraan petani meningkat, daya saing produk nasional semakin kuat, dan kontribusi sektor perkebunan terhadap devisa negara semakin besar. "Saat ini, kami juga sudah memiliki pabrik produk turunan kelapa sehingga harga di tingkat petani cukup baik. Dengan adanya program ini, kami optimistis pengembangan bibit dan hilirisasi akan semakin memperkuat kesejahteraan masyarakat," kata Gubernur Sherly.**Yul**

Produksi Ginger Ale, **Redi Berdayakan Petani Jahe**

Bagi Masyarakat di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, minuman ginger ale yang berbahan dasar jahe menjadi teman saat udara dingin. Dengan rasa sedikit pedas dari jahe memberikan sensasi menenangkan tubuh. Bahkan dapat membantu meredakan mual dan muntah, serta meningkatkan pencernaan.



Ginger ale adalah minuman ringan berkarbonasi yang diberi rasa jahe, dibuat dengan campuran air, gula, dan ekstrak jahe, yang dapat dinikmati langsung sebagai minuman atau dicampur dalam koktail. Minuman ini terkenal sebagai obat rumahan untuk mual dan sakit perut yang umumnya tidak mengandung alkohol.

Ginger ale adalah minuman bersoda dengan gelembung karbon dioksida. Minuman berbahan dasar jahe ini umumnya menggunakan pemanis seperti gula atau sirup jagung fruktosa tinggi untuk memberikan rasa manis.

Adalah Redi, pria berusia 33 tahun yang beralamat di Jl Balong Garawangi Sindangagung Kuningan, Jawa Barat mencoba membuat minuman tradisional mempunyai nilai jual ekonomi tinggi. Selain menjual di Kedai WRB miliknya, ia juga memasarkan ke beberapa daerah.

Produk fermentasi jahe emprit, lemon gula dan rempah kayu manis kapulaga, serta cengkeh merupakan inovasi Redi . “Saya ciptakan ini untuk kaum muda. Biasanya minuman jahe itu kan untuk kaum tua saja, kini anak muda pun bisa minum ini dengan kemasan yang lebih unik dan rasanya nyentrik,” katanya.

Minuman ini menurutnya, dapat dikonsumsi dua hari sekali. Bahkan aman untuk penderita diabetes. “Saya generasi Z, sebulan saja saya bisa sampai 3.000 botol yang dijual ke beberapa daerah seperti Depok, Jagakarsa, Jakarta dengan omzet sekitar Rp 20 juta per bulan,” ujarnya pada Tabloid Sinar Tani.

Untuk bahan baku, Redi mengatakan, saat ini Kedai WRB bermitra dengan 15 petani. Jadi, visi utama Kedai WRB adalah membantu petani sekitar agar mereka bisa memiliki pengasilan jelas.

Bagaimana membuat ginger ale. Redi menjelaskan, beberapa bahan yang diperlukan adalah 4 gelas air 300 gram jahe segar, kupas dan potong-potong 3 lembar kulit lemon, masing-masing sekitar 10 cm, hanya bagian kuningnya saja 1 1/2 gelas gula pasir 3 liter soda dingin.

Cara membuat ginger ale yakni masukkan air, jahe, dan kulit lemon ke dalam panci berukuran empat liter, dan didihkan dengan api besar. Kecilkan api dan biarkan mendidih dengan api kecil, tanpa penutup, selama sepuluh menit.

Lalu tambahkan gula, dan aduk terus. Didihkan hingga menyusut menjadi tiga gelas (sekitar 15 menit). Letakkan saringan di atas mangkuk besar. Tuangkan sirup jahe dan buang kulit lemon.

”Potongan jahe yang sudah disaring dan dimasak dapat digunakan untuk penggunaan lain seperti es krim vanila atau yogurt, jika diinginkan,” katanya. Selanjutnya, biarkan sirup jahe menjadi dingin sebelum dituang ke dalam wadah kaca. Tutup rapat dan dinginkan, setidaknya selama satu jam sampai dingin.

”Kita dapat menyimpannya hingga satu minggu di lemari es. Saat siap disajikan, campurkan 60 ml sirup jahe dengan 237 ml soda dingin per porsi dan tuangkan di atas es. Sirup jahe atau gula dapat ditambahkan untuk mempermanis sesuai selera,” tuturnya. **Echa/Yul**

Komersialisasi E-PAPER Sinartani

Sinartani Tabloid sinartani.com SINTA TV

E-paper Sinartani sudah berjalan selama 2 tahun dan memberikan informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan Sinartani versi cetak. E-paper Sinartani terbit tiap minggu, 48 kali setahun, terdiri dari 20-24 halaman sekali terbit. Informasinya mencakup issue-issue yang lebih melebar, selain pertanian juga mencakup informasi umum dan humaniora.

Sampai saat ini e-Paper Sinartani masih didistribusikan secara gratis ke semua penyuluh. Kini, waktunya E-Paper yang sudah dikenal oleh penyuluh dan petani itu mulai dijual secara komersil dengan harga yang teramat murah, yaitu Rp 1.500/edisi atau Rp 72.000/tahun.

Mudah-mudahan upaya ini merupakan sinergi yang baik antara pembaca dengan penerbit Sinartani yang tidak henti-hentinya berupaya meningkatkan kualitas Sinartani agar lebih bermanfaat dan sekaligus memberi bahan bacaan yang baik bagi pembacanya.

Para pembaca yang ingin berlangganan dipersilahkan mengirimkan nama dan nomor HP-nya, melalui WhatsApp ke Sdr Wawan (081216304232) serta mentransfer biaya tahunan sebesar Rp 72.000 ke Rekening Sinartani: Bank Mandiri Cab. Ragunan No. 127.0096.016.413



BERLANGGANAN
E-paper Tabloid Sinartani

Hanya dengan
Rp. 72.000 / Tahun

HUBUNGI :
0813 1757 5066
Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut

KAMI MENJANGKAU LEBIH LUAS

www.tabloidsinartani.com tabloidsinartani.com tabloidsinartani.com @SinarTaniST tabloidsinartani SINTA TV

Peringati Hari Tani, **Petani Indramayu Gelar Aksi di Kementan**

Memperingati Hari Tani, Rabu (24/9), petani Indramayu yang tergabung dalam Serikat Tani Indramayu menggelar aksi damai di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (24/9). Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman pun menemui perwakilan petani yang melakukan aksi di Hall D, Kementerian Pertanian.



Aksi damai yang dimulai sejak pagi hingga siang ini dikawal sekitar 800 personel gabungan TNI, Polri, Pemda, Satpol PP, serta pihak internal Kementan. Selain itu, sejumlah elemen masyarakat dan LSM juga dilibatkan dalam pengamanan untuk memastikan kegiatan berjalan tertib.

Mereka membawa empat tuntutan, yaitu memasukkan kelembagaan petani dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, modernisasi alsintan, peningkatan fasilitas irigasi, dan reforma agraria. Saat bertemu Menteri Pertanian, berbagai keluhan diungkapkan petani. Misalnya, soal distribusi pupuk subsidi yang tak sampai ke petani, program bantuan alsintan hingga masalah irigasi pertanian yang rusak.

"Kami datang jauh dari Indramayu dan ternyata beliau sangat peduli pada petani. Bahkan berjanji akan bersilaturahmi langsung ke Indramayu dalam waktu dekat," kata Ketua Serikat Tani Indramayu, Damuri. Sementara itu, Fadilah, perwakilan petani yang lain berharap pemerintah memberikan respon cepat terhadap masalah petani.

"Terima kasih Pak Menteri yang peduli terhadap petani Indramayu dan petani Indonesia. Tadi perwakilan kami menyampaikan langsung berbagai keluhan, dan beliau merespons cepat," ujar Fadilah.

Menyikapi keluhan petani, Mentan Amran tidak sekadar mendengar keluhan, tetapi juga bergerak cepat merespons aspirasi tersebut. Dalam dialog dengan 20 perwakilan petani, ia langsung mengambil langkah tegas dan konkret, mulai dari menindak penyelewengan pupuk, mempercepat perbaikan irigasi, hingga membentuk brigade pangan di Indramayu.

Salah satu keluhan utama petani adalah harga pupuk bersubsidi yang dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Mendengar laporan itu, Mentan Amran segera menginstruksikan pencabutan izin bagi distributor maupun pengecer nakal. "Tidak boleh ada yang menyusahkan petani kita. Jika ada distributor menjual pupuk di atas HET, cabut izinnya mulai hari ini," tegas Amran.

Selain itu, petani Indramayu juga mengeluhkan sulitnya akses air untuk lahan pertanian. Menanggapi hal ini, Mentan Amran langsung berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Jawa Barat serta Direktur Irigasi Pertanian Kementan untuk percepatan perbaikan infrastruktur pengairan. "Besok tim turun ke lapangan, ketemu petani, dan selesaikan masalah perpompaan serta irigasinya. Tidak boleh ada lahan yang terbengkalai hanya karena kekurangan air," ujarnya.

Tak berhenti di situ, Mentan juga memerintahkan pembentukan Brigade Pangan di Kecamatan Kroya, Indramayu. Brigade ini akan diperkuat dengan alsintan modern, seperti *hand tractor* dan pompa air, untuk mempercepat proses tanam dan meningkatkan efisiensi kerja petani. "Intinya kami adalah pelayan rakyat. Kami akan monitor semua aspirasi Bapak Ibu. Doakan, jika tidak ada cuaca ekstrem, kita bisa swasembada pangan lebih cepat," ujarnya.

Dengan langkah cepat tersebut, para petani Indramayu meyakini hadirnya Mentan Amran sebagai bentuk nyata kehadiran negara di tengah petani. Dukungan dan keberpihakan pemerintah pusat diharapkan mampu memperkuat semangat petani dalam menjaga ketahanan pangan nasional. **Yul**

Jambore Penyuluh, Wamentan Serukan Revolusi Pertanian



Penyuluh berperan penting dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Karena itu, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono mengajak seluruh penyuluh pertanian untuk terus menjadi garda terdepan dalam menjaga produktivitas pangan.

"Tidak ada artinya pejabat di pusat kalau penyuluh pertanian tidak prima. Semua produktivitas, semua capaian pertanian sampai hari ini adalah buah dari kerja keras penyuluh di lapangan," katanya dihadapan ratusan penyuluh pertanian dan petani milenial dari berbagai daerah di Indonesia dalam Jambore Penyuluh Pertanian Nasional dan Petani Milenial 2025 di Gresik, Jawa Timur, Kamis (25/9).

Menurut Sudaryono , penyuluh adalah garda depan yang setiap hari mendampingi petani, membina, hingga mendengarkan keluh kesah mereka. "Kadang-kadang penyuluh menerima beban keluhan yang tidak selalu bisa mereka selesaikan. Tapi di situlah letak pengabdian mereka. Dan pemerintah hadir untuk memberi dukungan penuh," ujarnya.

Wamentan menjelaskan, penyuluh kini menjadi bagian langsung dari pemerintah pusat, dengan tugas dan target yang jelas. Setiap penyuluh memiliki indikator kinerja (KPI) yang terukur, mulai dari peningkatan produktivitas, indeks pertanaman, hingga proyeksi panen.

"Penyuluh adalah motor penggerak produktivitas. Mereka harus punya ukuran kinerja yang jelas, dan itu sudah kita tetapkan. Tugas mereka sama seperti sebelumnya, hanya saja sekarang jalurnya langsung di bawah kendali Kementerian Pertanian," kata Wamentan.

Selain perwakilan Jawa Timur sebagai tuan rumah, Jambore ini juga dihadiri penyuluh dan petani milenial dari berbagai provinsi. Momentum ini menjadi ajang penyamaan persepsi nasional bahwa penyuluh bukan sekadar pendamping, melainkan penentu arah pertanian Indonesia.

"Dengan adanya Jambore ini, kita ingin menegaskan bahwa penyuluh pertanian adalah pahlawan pangan, dan petani milenial adalah energi baru bangsa. Keduanya harus jalan bersama agar Indonesia mandiri, modern, dan berdaulat pangan," kata Wamentan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian, Idha Widi Arsanti, mengatakan bahwa Jambore ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran penyuluh dan petani milenial dalam pembangunan pertanian.

"Penyuluh adalah guru sekaligus sahabat bagi petani. Sementara petani milenial adalah motor penggerak inovasi. Jika keduanya bersatu, pertanian Indonesia akan melesat lebih cepat menuju swasembada pangan," ujar Idha.

Ia menambahkan, Kementerian Pertanian terus berkomitmen memperkuat kapasitas SDM pertanian melalui berbagai pelatihan, peningkatan kompetensi, serta penyediaan sarana pendukung agar penyuluh semakin profesional dan petani milenial semakin berdaya saing. "Melalui acara ini kita harapkan penyuluh dan petani semakin semangat dan bersama bergerak di lapangan wujudkan swasembada pangan Indonesia," kata Idha. **Yul**

PONJAY BENDAV, Anggur Lokal Tangerang Selatan



Pengembangan anggur lokal di Tangerang Selatan terus menunjukkan kemajuan. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Penggiat Anggur Indonesia (ASPAI) Tangerang Selatan sukses melaksanakan uji observasi terhadap varietas anggur introduksi bernama Ponjay Bendav.

Kegiatan ini digelar di kebun milik Kelompok Tani Cipayung (Ketan-cap), Komunitas Anggur Tangsel (KAT), yang berlokasi di Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat. Uji observasi ini merupakan langkah penting dalam proses pendaftaran Ponjay Bendav sebagai varietas lokal.

Peneliti dari Pusat Riset Tanaman Pangan, Organisasi Riset Pertanian dan Pangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Muhammad Iskandar Ishaq mengatakan, anggur introduksi dapat didaftarkan sebagai varietas lokal jika telah lama dibudidayakan di Indonesia dan menunjukkan perbedaan karakteristik dari varietas aslinya.

"Cukup ada satu karakter morfologis atau agronomis yang berbeda, sudah bisa didaftarkan sebagai varietas," kata Iskandar yang menjadi ketua tim penguji. Ponjay Bendav merupakan hasil budidaya dari varietas Transfiguration asal Ukraina. Nama Ponjay Bendav berasal dari kombinasi dua nama yaitu "Ponjay" dari Kelurahan Pondok Jaya tempat induk tanaman ditanam, dan "Bendav" sebagai bentuk penghargaan kepada Walikota Benyamin Davnie.

Dikatakan, setelah melalui masa tanam dan adaptasi di wilayah Tangerang Selatan, anggur ini memperlihatkan ciri khas tersendiri yang membedakannya dari varietas asal. Karena proses budidayanya dilakukan petani tanpa pemuliaan, sehingga varietas ini layak didaftarkan sebagai varietas lokal.

Proses uji observasi ini melengkapi kegiatan karakterisasi sifat morfologis dan agronomis yang sudah dilakukan sejak 2023. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sertifikat tanda daftar sebagai bukti kepemilikan. Adapun dokumen hasil uji observasi akan digunakan bersama dokumen uji kebenaran dari balai pengawasan dan sertifikasi benih untuk mengajukan Surat Keputusan (SK) peredaran dari Kementerian Pertanian.



11 Varietas

Ketua 1 Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ASPAI, Roy Nurdin menyatakan, ASPAI menargetkan pendaftaran 11 varietas anggur introduksi lainnya sebagai varietas lokal. "Pendaftaran varietas adalah bagian dari gerakan kami untuk mengurangi impor anggur. Lebih bagus lagi kalau kita bisa swasembada anggur," ujar Roy.

Roy berharap pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya turut memberikan dukungan agar program pendaftaran varietas lokal dan pengembangan budidaya anggur bisa berjalan lancar.

Sementara itu Penyuluh pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Tangerang Selatan, Febry Putra menyampaikan, pihaknya sangat mendukung proses legalisasi varietas lokal ini. "Penting bagi kami untuk melepas varietas lokal anggur Ponjay Bendav, karena ini menjadi kebanggaan warga Tangsel. Saya ditunjuk sebagai operator untuk mengunggah dokumen pendaftaran secara daring," ujarnya.

Dukungan terhadap pengembangan anggur lokal juga datang dari istri Gubernur Provinsi Banten, Tinawati Andra Soni yang memanen anggur Ponjay Bendav langsung dari kebun milik Kelompok Tani Cipayung. "Senang sekali bisa langsung memanen anggur. Rasanya manis dan menyenangkan. Lelah pun terbayar," ucap Tinawati.

Ia optimis bahwa budidaya anggur di Tangerang Selatan memiliki masa depan cerah, termasuk dari sisi pasar. Acara panen tersebut juga dihadiri oleh Walikota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie. Ia menyampaikan komitmennya untuk menjadikan Tangerang Selatan sebagai kota penghasil anggur.

"Kami melihat potensi besar. Lahan seluas 300 meter persegi saja sudah bisa produktif. Apalagi kalau lebih luas. Kami sudah komunikasi dengan para pemilik lahan, baik pengembang maupun institusi. Tinggal intensifkan komunikasi dengan petani," kata Benyamin, walikota Tangerang Selatan periode 2025–2030.

Sementara itu Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi Banten Erry Yanuar menyatakan, keberhasilan ini merupakan solusi cerdas di tengah keterbatasan lahan pertanian di wilayah perkotaan seperti Tangsel. "Kota Tangsel tidak memiliki lahan sawah, jadi solusinya adalah urban farming dan penanaman anggur," katanya.

Selama ini Ia menambahkan, Indonesia masih mengimpor anggur dengan nilai mencapai Rp 7 triliun per tahun. Dengan inisiatif lokal seperti Ponjay Bendav, Erry berharap kontribusi petani dalam negeri dapat menekan impor hingga 5 persen. "Kita ini menjadi satu-satunya yang telah memiliki varietas anggur lokal bernama Ponjay Bendav. Ini harus terus dikembangkan," katanya.

Keunggulan budidaya anggur di Indonesia, menurutnya, terletak pada kemampuannya beradaptasi di berbagai dataran dan fleksibilitas panen sepanjang tahun. Jika di negara empat musim, panen anggur terbatas, maka di Indonesia bisa panen kapan saja. Ini menjadi keunggulan luar biasa.

Selain wilayah Tangerang Selatan (Tangsel), daerah lain di Banten seperti Serang, Cilegon, Pandeglang, dan Kabupaten Tangerang sudah mulai menanam anggur, namun belum menghasilkan varietas lokal seperti Ponjay Bendav.

Pembina DPP ASPAI Tangerang Selatan, Lista Hurustiati mempunyai harapan besar ke depan, anggur Tangsel bisa mengisi toko buah modern. Jika malang terkenal dengan buah apel, maka Tangsel memiliki anggur.

Saat ini pihaknya juga sedang mengembangkan olahan keripik dari daun anggur. "Kami sedang proses inovasi produk keripik daun anggur," ujar Lista yang juga dikenal sebagai Ibu Anggur Tangerang Selatan. Karena itu, Ia berharap anggota ASPAI Tangsel juga bisa terlibat dalam pembibitan, penanaman, dan perawatan.

Namun Lista mengakui, kendalanya saat ini adalah keterbatasan green house. Ia pun berharap adanya bantuan tambahan berupa greenhouse agar pengembangan tanaman anggur di Tangerang Selatan bisa semakin maju. **Herman/Yul**